

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah dapat disusun dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini dilaksanakan sebagai salah satu pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).

Akhir kata, kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini

Padang, Februari 2021

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,

dto

HANSASTRI, SE, Ak, MM, CFA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641013 199103 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum	1
1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
1.1.2 Data Geografis wilayah.....	1
1.1.3 Jumlah Penduduk.....	3
1.1.4 Jumlah Kabupaten dan Kota	5
1.2. Perencanaan Pembangunan	5
1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah.....	5
1.2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	24
1.2.3 Program Pembangunan Daerah	27
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	33
2.1. Capaian Kinerja Makro	33
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia	33
2.1.2 Tingkat Kemiskinan	38
2.1.3 Angka Pengangguran.....	42
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	43
2.1.5 PDRB per Kapita (ADHB).....	47
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan	48
BAB III KINERJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.....	50
3.1. Gambaran Organisasi	50
3.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	50
3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	51
3.1.3 Srtuktur Organisasi	53
3.1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia	55
3.1.5 Dukungan Sarana dan Prasarana.....	57
3.2. Tujuan dan Sasaran	58
3.2.1 Tujuan.....	58
3.2.2 Sasaran	58
3.3. Program dan Kegiatan.....	60
3.4. Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis	65
3.5. Pencapaian Target Kinerja Keuangan	68
3.6. Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	69
BAB IV PENUTUP	85
4.1. Kesimpulan	85
4.2. Saran	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kab/Kota Tahun 2016-2020	4
Tabel 1.2	Struktur Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin.....	4
Tabel 1.3	Luas Wilayah per Kab/kota, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Nagari/Desa ...	5
Tabel 1.4	Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat	27
Tabel 2.1	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	34
Tabel 2.2	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota	34
Tabel 2.3	Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	35
Tabel 2.4	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	36
Tabel 2.5	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	38
Tabel 2.6	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Barat	39
Tabel 2.7	Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat	40
Tabel 2.8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) ...	41
Tabel 2.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat 2016-2020	44
Tabel 2.10	Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi se Sumatera Tahun 2016-2020	44
Tabel 2.11	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera	45
Tabel 2.12	Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	46
Tabel 2.13	Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi	46
Tabel 3.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	55
Tabel 3.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	55
Tabel 3.3	Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun 2020	57
Tabel 3.4	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	59
Tabel 3.5	Rencana Program dan Kegiatan pada APBD Tahun 2020	60
Tabel 3.6	Rencana Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2020	63
Tabel 3.7	Capaian Strategis Terhadap Indikator Kinerja Tahun 2020	65
Tabel 3.8	Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD Tahun 2020	68
Tabel 3.9	Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja APBD Tahun 2020	68
Tabel 3.10	Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2020	69
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan APBD Tahun 2020	71
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2020	81

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum Sumatera Barat yang memuat data geografis wilayah, jumlah penduduk, jumlah kabupaten/kota, visi dan misi kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah serta program pembangunan daerah.

1.1 Penjelasan Umum

1.1.1 Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatra Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Secara administrative Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swantatra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).

1.1.2 Data Geografis Wilayah

Secara Geografis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 3°30' Lintang Selatan (LS), dan 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat $\pm 42.012,89 \text{ km}^2$ dan luas perairan (laut) $\pm 52.882,42 \text{ km}^2$, dengan panjang pantai wilayah daratan $\pm 375 \text{ km}$ ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai $\pm 1.003 \text{ km}$, sehingga total garis pantai keseluruhan $\pm 1.378 \text{ km}$.

Perairan laut Sumatera Barat memiliki 220 pulau-pulau kecil dengan jumlah pulau terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 115 pulau. Secara administratif, wilayah Sumatera Barat berbatasan sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah Barat dengan Samudera Hindia dan sebelah Timur dengan Provinsi Riau dan Jambi.

Letak geografis Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara $25,35^{\circ}\text{C}$ dan rata-rata kelembaban udara yang tinggi yaitu 83,79% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 975,19 mb. Pengaruh letak ini pula, maka ketinggian permukaan daratan Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten

Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat sama dengan provinsi lainnya di Indonesia mempunyai musim penghujan.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat



Suhu udara ditentukan oleh tinggi rendahnya daratan dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum daerah Sumatera Barat pada tahun 2017 beriklim panas dengan suhu udara berkisar dari 24,4° C sampai 26,1° C serta tekanan udara minimum 980,2 mbar dan maksimum 1.006,0 mbar dengan kelembaban udara relatif minimum 81% dan kelembaban relatif maksimum 86%.

Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya tercatat sebesar 23.190,11 Km² atau sekitar 54,83% dari seluruh kawasan. Sumatera Barat juga memiliki empat danau yang indah, satu berada di Kabupaten Agam yaitu Danau Maninjau dan tiga lainnya di Kabupaten Solok yaitu Danau Singkarak, Danau Ditas dan Danau Dibawah. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung yang terdapat pada Kabupaten/Kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat.

Ketinggian permukaan wilayah di Provinsi Sumatera Barat sangat bervariasi mulai dari dataran rendah di pantai dengan ketinggian 0 m hingga dataran tinggi (pegunungan) dengan ketinggian > 3.000 m di atas permukaan laut (dpl). Luas areal yang mempunyai ketinggian 0 sampai 100 m dpl meliputi 1.286.793 ha (30,41%), daerah dengan ketinggian 100 – 500 m dpl mencapai 643.552 ha (15,21%), antara 500 – 1.000 m dpl seluas 1.357.045 ha (32,07%), antara 1.000 – 1.500 m dpl terdapat 767.117 ha (18,13%), daerah dengan ketinggian 1.500 – 2.000 m dpl tercatat 113.116,6 Ha (2,67%) dan sisanya daerah dengan ketinggian di atas 2.500 m dpl.

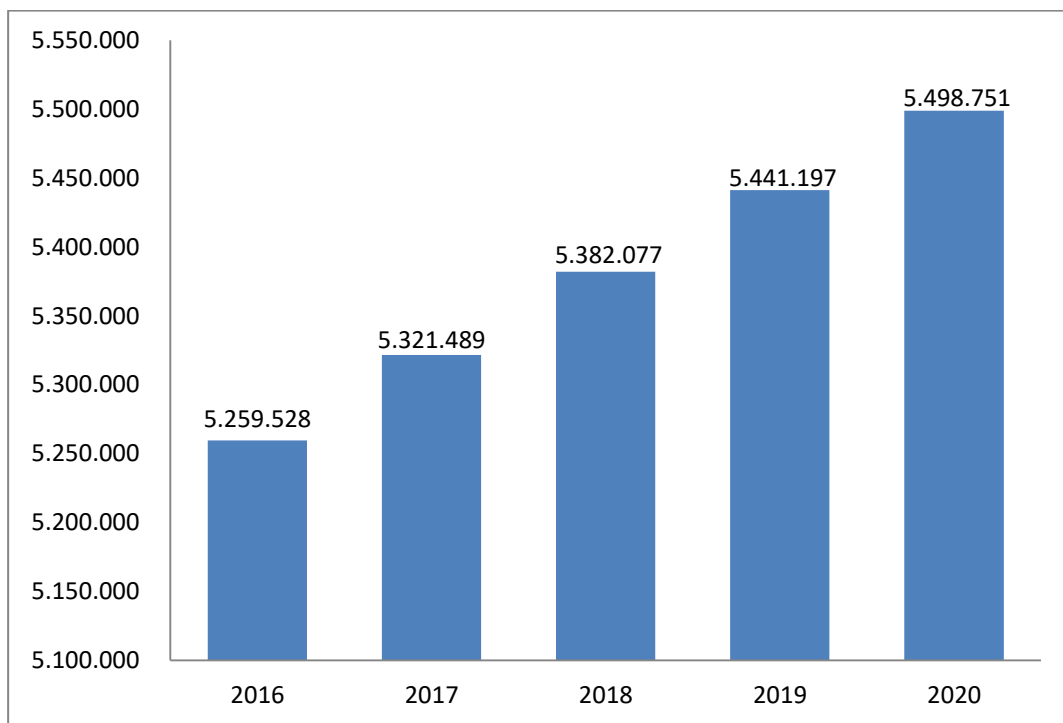
Dengan kondisi topografi tersebut diatas, potensi sumberdaya alam yang terdapat di Sumatera Barat bervariasi intensitas dan penggunaannya. Pada dataran rendah, intensitas penggunaan dapat lebih maksimal, sementara itu pada dataran tinggi intensitas penggunaan akan dihadapkan pada faktor pembatas lahan. Diharapkan pemanfaatan lahan dapat dikelola secara seksama dengan memperhatikan dampak lingkungan, sehingga tidak terjadi kerusakan

yang berdampak negatif untuk masa kini dan masa yang akan datang. Dataran tinggi di wilayah Sumatera Barat sebagian besar merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan termasuk rantai Pegunungan Bukit Barisan yang membentang dari Utara hingga Selatan Pulau Sumatera. Lahan yang ada pada kawasan perbukitan dan pegunungan tersebut dengan kelerengan di atas 40% tercatat sebesar 1.017.000 Ha.

1.1.3 Jumlah Penduduk

Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah 42.012,89 km². Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan (grafik 1.1). Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 sebanyak 5.498.751 jiwa, mengalami peningkatan sebanyak 239.223 jiwa dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2016 yaitu 5.259.528 jiwa. Namun laju pertumbuhan penduduk Sumatera Barat tahun 2016-2020 (1,14 persen) mengalami penurunan dibandingkan laju pertumbuhan tahun 2010-2015 (1,33 persen).

Grafik 1.1
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2016 – 2020 (jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun

Pada umumnya jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dicermati pada tahun 2016 jumlah penduduk Sumatera Barat berjumlah 5.259.528 jiwa, tahun 2017 meningkat menjadi 5.321.489 jiwa, tahun 2018 mencapai 5.382.077 jiwa, pada tahun 2019 mencapai 5.441.197 jiwa dan pada tahun 2020 sudah mencapai 5.498.751 jiwa.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2020 tersebut, tampak bahwa sebaran penduduk Provinsi Sumatera Barat 72,56% berada di daerah kabupaten dan 27,43% berada di wilayah kota. Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman

Barat dan Kabupaten Padang Pariaman merupakan 5 (lima) daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat sedangkan Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang relatif paling kecil. Seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2016 – 2020

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
	Kabupaten :					
1	Kep.Mentawai	86.981	88.692	90.373	92.021	93.575
2	Pesisir Selatan	453.822	457.285	460.716	463.923	467.062
3	Solok	366.213	368.691	371.105	373.414	375.722
4	Sijunjung	226.300	230.104	233.810	237.376	240.916
5	Tanah Datar	345.706	346.578	347.407	348.219	348.894
6	Padang Pariaman	408.612	411.003	413.272	415.613	417.781
7	Agam	480.722	484.288	487.914	491.282	494.614
8	Lima Puluh Kota	372.568	376.072	379.514	382.817	385.989
9	Pasaman	272.804	275.728	278.480	281.211	283.864
10	Solok Selatan	162.724	165.603	168.411	171.075	173.784
11	Dharmasraya	229.313	235.476	241.571	247.579	253.483
12	Pasaman Barat	418.785	427.295	435.612	443.722	451.705
	Kota :					
13	Padang	914.968	927.011	939.112	950.871	962.196
14	Solok	67.307	68.602	69.776	71.010	72.106
15	Sawahlunto	60.778	61.398	61.898	62.524	63.027
16	Padang Panjang	51.712	52.422	52.994	53.693	54.421
17	Bukittinggi	124.715	126.804	128.783	130.773	132.723
18	Payakumbuh	129.807	131.819	133.703	135.573	137.487
19	Pariaman	85.691	86.618	87.626	88.501	89.402
	SUMBAR	5.259.528	5.321.489	5.382.077	5.441.197	5.498.751

Sumber Data : BPS, Publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010- 2020, SP 2010

Pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus mengalami penurunan setiap tahun, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 sebesar 1,22 % menjadi 1,14 % pada tahun 2020 seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.2
Struktur Penduduk Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk (jiwa)	5.259.528	5.321.489	5.382.077	5.441.197	5.498.751
	- Laki-laki	2.617.273	2.649.599	2.681.113	2.711.772	2.741.537
	- Perempuan	2.642.255	2.671.890	2.700.964	2.729.425	2.757.214
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,22	1,18	1,14	1,10	1,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun

1.1.4 Jumlah Kabupaten dan Kota

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu 6,01 ribu km² atau sekitar 14,21% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,0 Km² (0,05%). Wilayah Sumatera Barat juga memiliki 179 Kecamatan, 230 Kelurahan dan 928 Nagari/desa, dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Luas Wilayah per Kab/kota, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Nagari/Desa di Provinsi Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wlayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan (2018)	Kelurahan (2018)	Jumlah Nagari/Desa (2019)
1.	Kab. Kep. Mentawai	6 011,35	10	-	43
2.	Kab. Pesisir Selatan	5 749,89	15	-	182
3.	Kab. Solok	3 738,00	14	-	74
4.	Kab. Sijunjung	3 130,40	8	-	61
5.	Kab. Tanah Datar	1 336,10	14	-	75
6.	Kab. Padang Pariaman	1 332,51	17	-	103
7.	Kab. Agam	1 804,30	16	-	82
8.	Kab. Lima Puluh Kota	3 571,14	13	-	79
9.	Kab. Pasaman	3 947,63	12	-	37
10.	Kab. Solok Selatan	3 346,20	7	-	39
11.	Kab. Dharmasraya	2 961,13	11	-	52
12.	Kab. Pasaman Barat	3 887,77	11	-	19
13.	Kota Padang	693,66	11	104	-
14.	Kota Solok	71,29	2	13	-
15.	Kota Sawahlunto	231,93	4	10	27
16.	Kota Padang Panjang	23,00	2	16	-
17.	Kota Bukittinggi	25,24	3	24	-
18.	Kota Payakumbuh	85,22	5	47	-
19.	Kota Pariaman	66,13	4	16	55

1.2 Perencanaan Pembangunan

1.2.1 Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah dapat diperoleh informasi berbagai aspek pembangunan Sumatera Barat yang telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama lima tahun terakhir. Kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai tersebut dapat dijadikan modal yang kuat untuk mempercepat pembangunan Sumatera Barat di masa mendatang. Meskipun kemajuan dan keberhasilan telah banyak dicapai, Sumatera Barat masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan secara berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

A. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat

Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam prioritas Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat antara lain:

1. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan adat, seni dan budaya,
2. Belum optimalnya pemanfaatan, peran dan fungsi pemangku dan lembaga adat dalam penanaman dan pengamalan nilai-nilai adat, seni dan budaya Minangkabau,
3. Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama,
4. Belum optimalnya apresiasi dan kebanggaan terhadap budaya daerah bagi generasi muda,
5. Belum optimalnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
6. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing dan pergaulan bebas, penyimpangan perilaku (LGBT) dan narkoba.
7. Pergeseran nilai-nilai agama dan adat di tengah kehidupan masyarakat.
8. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan karakter dan pendidikan yang dilandasi oleh nilai-nilai agama dan adat.
9. Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing, pergaulan bebas, narkoba serta penyimpangan perilaku (LGBT).

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan

Yang masih menjadi permasalahan serta sasaran yang belum tercapai dalam prioritas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
2. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
3. Belum optimalnya penyusunan dan penerapan produk hukum daerah,
4. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan daerah,
5. Belum optimalnya pengelolaan asset barang milik daerah,
6. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
9. Belum optimalnya keterbukaan informasi kepada publik.
10. Belum optimalnya sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

C. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan

Beberapa permasalahan dalam Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan Menengah antara lain :

1. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat.
2. Belum tuntasnya relevansi pendidikan kejuruan/ketrampilan dengan lapangan kerja,
3. Perlu peningkatan profesionalitas dan distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan formal dan non formal,
4. Belum tuntasnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan
5. Perlu peningkatan kualitas manajemen pendidikan,
6. Belum optimalnya penduduk usia sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan,
7. Masih tingginya ketimpangan kualitas lulusan SMA/SMK/MA antar daerah dimana umumnya kualitas lulusan daerah kota lebih baik dari kabupaten.
8. APM pendidikan menengah dan kualitas kelulusan masih perlu ditingkatkan.
9. Masih cukup banyak penduduk usia sekolah yang belum mendapat layanan pendidikan
10. Ketimpangan distribusi guru.
11. Ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah.
12. Belum optimalnya distribusi guru.

D. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Permasalahan dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai berikut:

1. Masih tingginya tingkat kematian ibu dan bayi,
2. Perbaikan Gizi Masyarakat (stunting),
3. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program TB,
4. Pengembangan dan Pencapaian indikator Program Malaria,
5. Penanggulangan HIV/AIDS,
6. Penyehatan Lingkungan dimana masih rendahnya pencapaian Stop Buang Air besar Sembarangan,
7. Belum optimalnya kepesertaan, layanan dalam jaminan kesehatan,
8. Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan,
9. Akreditasi Rumah Sakit,
10. Keterbatasan kapasitas, kuantitas dan distribusi tenaga medis dan paramedis,
11. Pengelolaan BLUD dan pelayanan masyarakat pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi,
12. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
13. Status Gizi Masyarakat Buruk dan prevalensi balita pendek masih belum dapat dikendalikan.
14. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dan akses pelayanan kesehatan daerah dan rujukan yang berkualitas belum merata.
15. Ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan antar daerah di Sumatera Barat (disebabkan karena sumberdaya kesehatan masih belum merata memenuhi standar yang ditetapkan dan terjadi ketimpangan ketersediaan, pendistribusian dan penempatannya).
16. Masih terbatasnya alat kesehatan dan obat-obatan dibandingkan dengan peningkatan kebutuhan.

E. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis

Permasalahan utama Urusan Pangan adalah :

1. Ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok serta distribusi dan pengawasan pangan belum terlaksana dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
2. Terbatasnya penganekaragaman/diversifikasi pangan,
3. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan,
4. Masih tingginya tingkat ketergantungan pada pangan beras
5. Pola konsumsi masyarakat belum berimbang,
6. Harga bahan pangan masih fluktuatif sehingga menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat
7. Keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius terutama bahan addiktif dan cemaran (bahan kimia, mikro organisme dan fisik) yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat,
8. Kurang stabilnya dan belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan dan harga pangan,
9. Keamanan pangan masih rendah dimana masih ditemukan pangan yang belum aman dikonsumsi masyarakat terutama pangan yang aman, sehat dan halal atau asuh.

Permasalahan utama urusan pertanian adalah :

1. Rendahnya daya saing produk pertanian,
2. Belum berkembangnya nilai tambah produk pertanian,
3. Produktivitas, pertanian, perkebunan dan populasi peternakan dan perikanan masih perlu peningkatan,
4. Terbatasnya aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan,
5. Masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian,
6. Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti bibit, pupuk, obat-obatan, dan pakan ternak,
7. Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD pertanian,
8. Banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum,
9. Terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen.

F. Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Investasi

Permasalahan utama urusan pariwisata adalah :

1. Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata,
2. Belum maksimalnya ikon wisata dan paket yang komprehensif,
3. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata,
4. Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan,
5. Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata maupun wisatawan,
6. Belum berkembangnya ekonomi kreatif.

Permasalahan utama urusan industri adalah :

1. Inovasi dan diversifikasi produk industri mikro kecil masih rendah,
2. Kapasitas SDM dan penguasaan teknologi rendah,
3. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan design produk,
4. Masih banyak produk industri mikro kecil dan menengah yang belum memenuhi standarisasi dan sertifikasi,
5. Keterbatasan akses pembiayaan untuk pengembangan industri,
6. Masih terbatasnya jejaring kerjasama pemasaran produk industri, terutama industri rumah tangga.

Permasalahan utama urusan perdagangan adalah :

1. Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor,
2. Terbatasnya sarana perdagangan dan distribusi
3. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri,
4. Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antar swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah serta pemerintah dengan pemerintah,
5. Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli,
6. Masih lemahnya pengawasan tata niaga komoditas dan jasa yang diperdagangkan Surplus Neraca Perdagangan mengalami penurunan,
7. Belum efisiensinya arus barang dan konektivitas (logistik, distribusi, dan fasilitasi perdagangan),
8. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa.

Permasalahan utama urusan koperasi adalah :

1. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi,
2. Rendahnya penggunaan teknologi tepat guna (TTG), informasi dan kelembagaan,
3. Rendahnya daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas),
4. Rendahnya inovasi dan pengembangan produk,
5. Struktur koperasi yang melakukan RAT masih rendah,
6. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan Kredit UMKM,
7. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan umkm belum sepenuhnya terwujud,
8. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen,
9. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (inkubator bisnis),
10. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi dan UMKM serta masih tingginya jumlah koperasi tidak aktif.

Permasalahan utama urusan penanaman modal adalah :

1. Masih tingginya kesenjangan (lag) investasi antara ijin prinsip dan realisasi investasi,
2. Kurang kondusifnya iklim & minat investasi,

3. Kurangnya dokumen informasi investasi seperti (FS, DED, dan lainnya).

G. Pengembangan Kemaritiman dan Kelautan

Permasalahan dalam pengembangan kemaritiman dan kelautan di Sumatera Barat meliputi :

1. Kualitas dan kuantitas benih dan induk masih rendah,
2. Harga pakan ikan pabrikaan tinggi,
3. Menurunnya potensi ikan tangkap di perairan laut Sumatera Barat,
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan dan pelabuhan perikanan,
5. Mutu dan pengolahan hasil produk perikanan masih rendah,
6. Penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System (CCS) belum optimal,
7. Masih maraknya kegiatan illegal unreported dan unregulated fishing,
8. Konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk ditingkatkan,
9. Kualitas SDM (nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan,
10. Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran,
11. Keterbatasan tenaga penyuluh.

H. Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal

Permasalahan dalam Percepatan Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pengangguran dan Daerah Tertinggal di Sumatera Barat meliputi:

1. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya,
2. Masih tinggi tingkat pengangguran,
3. Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur,
4. Belum optimalnya fasilitas sarana prasarana pelatihan,
5. Belum tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh Kab/Kota,
6. Kurangnya tenaga muda potensial dan terdidik untuk mengabdikan dan berusaha di perdesaan,
7. Kelembagaan pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintahan nagari dalam proses pembangunan belum berfungsi dan difungsikan,
8. Lembaga keuangan mikro di perdesaan belum mampu melayani kebutuhan modal usaha produktif secara murah, ringan dan cepat.
9. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan masih bersifat parsial dan sektoral.

I. Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur

Permasalahan dalam Pengembangan Energi dan Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat meliputi :

1. Masih banyaknya masyarakat yang menempati rumah tidak layak huni yang tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai,
2. Masih tingginya backlog perumahan, serta berubahnya indeks kegempaan sehingga standar pembangunan rumah dan bangunan juga semakin mahal,

3. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase),
4. Belum optimalnya sistim perencanaan penyediaan air minum dan penanganan sampah serta terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum dan pengelolaan sampah,
5. Masih rendahnya pencapaian target Universal Access, 100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak (100-0-100) untuk tahun 2019,
6. Penataan kawasan bangunan dan lingkungan serta kawasan permukiman belum maksimal.
7. Belum optimal konektifitas dan aksesibilitas antar daerah,
8. Belum terlaksananya pembangunan infrastruktur dan program strategis daerah.

J. Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam

Permasalahan dalam Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Alam di Sumatera Barat meliputi :

1. Belum optimalnya penyebaran informasi tentang kebencanaan kepada masyarakat,
2. Sarana prasarana penanggulangan bencana belum memadai,
3. Masih rendahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana,
4. Pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam belum memadai,
5. Masalah terkait kuantitas/ketersediaan air,
6. Terjadi perbedaan debit air sungai antara musim kemarau dan musim hujan yang sangat menyolok di beberapa sungai,
7. Terjadi perbedaan tinggi permukaan air yang signifikan pada danau untuk PLTA,
8. Terjadi kerusakan daerah aliran sungai (DAS) dan daerah tangkapan air (DTA) sebagai sumber dari ketersediaan air,
9. Terbatasnya kualitas air, udara dan lahan.
10. Peningkatan penanganan tanggap darurat bencana
11. Peningkatan pemulihan daerah pasca bencana

2) Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Urusan Pemerintahan Daerah

A. Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan
 - a. Belum terpenuhinya anggaran dalam pemenuhan SPM Pendidikan serta biaya operasional sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
 - b. Kompetensi lulusan SMK belum bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja.
2. Urusan Kesehatan
 - a. Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota belum berjalan maksimal antara lain disebabkan, belum optimalnya kemitraan berbagai sektor dalam mendukung penyelenggaraan akreditasi, masih minimnya dana, sarana, peralatan serta SDM baik medis, paramedis dan tenaga administrasi.
 - b. Terbatasnya anggaran BLUD untuk mendukung operasional Rumah Sakit dan terhambatnya pencairan dana klaim dari BPJS ke Rumah Sakit sehingga menyebabkan terganggunya operasional Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

- c. Kompetensi, jumlah dan distribusi SDM kesehatan (medis dan para medis) yang kurang merata.
- d. Masih terbatasnya jumlah dan jam pelayanan dokter spesialis khususnya spesialis Non Jiwa serta sarana/prasarana dan peralatan kesehatan sehingga menghambat kelancaran pelayanan yang diberikan.
- e. Terjadinya peningkatan penyakit non jiwa yang mengiringi penyakit jiwa dan terjadinya peningkatan penderita ketergantungan NAPZA mengharuskan RS Jiwa Prof HB Saanin mengembangkan pelayanan Non Jiwa yang menunjang pelayanan jiwa prima.
- f. Konsumsi/asupan zat gizi yang masih rendah ditambah dengan adanya penyakit infeksi yang mendorong balita kekurangan gizi/menjadi gizi buruk.
- g. Akses layanan yang terhambat karena terbatasnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan hambatan dalam sistem rujukan untuk penyakit tertentu.
- h. Pola hidup yang tidak sehat menyebabkan peningkatan risiko penyakit menular.
- i. Ketersediaan obat dan logistik program yang belum terpenuhi secara terus menerus.
- j. Masih tingginya prevalensi stunting di Sumatera Barat.
- k. Menurunnya jumlah kunjungan akibat sistem rujukan online berjenjang yang diterapkan oleh BPJS, berdampak terhadap penurunan pendapatan BLUD sehingga target RPJMD tidak tercapai.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya akses terhadap air minum dan sanitasi (air limbah, pengelolaan sampah dan drainase)
- b. Masih belum optimalnya penataan bangunan dan lingkungan
- c. Masih terkendalanya legalisasi rencana tata ruang
- d. Masih ditemui pelaksanaan pembangunan tidak mengacu kepada Rencana Tata Ruang
- e. Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan provinsi dan tingginya tingkat kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan
- f. Masih tingginya tingkat kerusakan infrastruktur irigasi dan infrastruktur pengendali daya rusak air
- g. Belum terintegrasinya pengelolaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air
- h. Masih banyak ditemui kendala dalam pembebasan lahan dan alih fungsi lahan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air
- i. Belum optimalnya peran serta dan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air
- j. Terjadinya perubahan regulasi yang berdampak terhadap kelembagaan sumber daya air.

4. Urusan Perumahan dan Permukiman

- a. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum Permukiman (PSU)
- b. Belum terpenuhinya SPM perumahan
- c. Belum optimalnya ketersediaan Data perumahan dan kawasan permukiman
- d. Perizinan pembangunan perumahan tumpang tindih dengan aturan sektor lain

5. Urusan Sosial

- a. Belum tersedianya data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat dari seluruh kab/kota sehingga mengakibatkan kesalahan dalam penyaluran bantuan
- b. Terbatasnya anggaran tersedia dalam pemenuhan SPM bidang sosial yakni rehabilitasi sosial dalam panti mengingat kebutuhan setiap kelayan cukup tinggi dan kebutuhan rehabilitasi sosial dalam panti swasta juga menjadi tanggungjawab SPM Provinsi
- c. Struktur nomenklatur organisasi perangkat daerah di kab/kota sangat bervariasi menyebabkan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi belum maksimal dan terpadu
- d. Terbatasnya penanganan pada tanggap darurat bencana

6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah
- b. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal
- d. Masihnya kurangnya SDM, baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta sarana dan prasarana.
- e. Belum lengkapnya kebijakan percepatan penyusunan peraturan dan prosedur operasional standar bidang penanggulangan bencana yang komprehensif pada tingkat daerah
- f. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan mitigasi, kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana
- g. Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan tanggap darurat
- h. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan upaya mitigasi dan kesiap siagaan menghadapi bencana

7. Urusan Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

- a. Semakin luntarnya rasa cinta tanah air dan semangat persatuan dan kesatuan yang membuat semakin mudahnya terjadi benturan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena melemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme.
- b. Nilai-nilai agama yang menjadi dasar terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat dan beragama, tata susila dan prilaku dalam bermasyarakat dan bernegara yang sudah menipis menyebabkan moral dan budaya bangsa ikut menipis
- c. Kurangnya perhatian terhadap proses demokrasi yang baik oleh partai ataupun individu yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi bukan kepentingan bersama
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada pemilu/pemilukada/pemilu.
- e. Masih banyaknya potensi konflik yang terjadi di Sumatera Barat khususnya konflik yang berlatar belakang sengketa lahan, pertambangan/perkebunan/perhutanan, perbatasan antar daerah, SARA, dan Pilkada.
- f. Masih tingginya angka kriminalitas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta kasus maksiat di Sumbar.

- g. Perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran paham/aliran yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
- h. Munculnya persoalan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah pasca direvisinya undang undang tentang pemerintahan daerah

8. Urusan Tenaga Kerja

- a. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka terutama dari lulusan SMK dan Strata Satu (S-1)
- b. Terbatasnya kesempatan kerja dan lapangan kerja.
- c. Masih rendahnya kualitas pencari kerja yang didominasi oleh lulusan SMK yang belum sesuai dengan kebutuhan industri kerja
- d. Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru.
- e. Rendahnya daya saing produktifitas tenaga kerja di Sumatera Barat
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana serta jumlah dan kualitas tenaga instruktur yang tersedia di BLK milik Pemerintah Provinsi
- g. Terbatasnya anggaran kegiatan pelatihan yang didanai melalui APBD, sehingga target pelatihan belum dapat tercapai, padahal animo masyarakat, UMKM untuk ikut dalam pelatihan yang berada di Kab/Kota sangat tinggi
- h. Perusahaan-perusahaan pada sektor usaha Mikro Kecil/ Menengah masih banyak yang belum memberikan perlindungan bagi tenaga kerjanya karena belum memahami ketentuan yang mengatur tentang jaminan sosial
- i. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk mematuhi peraturan perundangundangan ketenagakerjaan bidang hubungan industrial dan jamsos
- j. Masih ada perusahaan yang belum melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap objek pengawasan atau peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang dioperasikan di perusahaan sehingga dapat berdampak kepada terjadi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta kerugian pada semua pihak
- k. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dikarenakan terbatasnya personil pengawas dan anggaran pengawasan
- l. Kurangnya sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan kerja serta terbatasnya ketersediaan dan pelatihan untuk para medis dan pelatihan hiperkes bagi Dokter Perusahaan
- m. Terbatasnya jumlah dan kompetensi fungsional Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta alokasi anggaran mendukung pelaksanaan pemeriksaan K3

9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Meningkatnya jumlah kasus perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan diantaranya : kekerasan seksual, kekerasan fisik, KDRT, bullying dan anak yang berperilaku menyimpang, isu narkoba, trafficking, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, anak dan perempuan dalam konflik sosial maupun kondisi darurat bencana
- b. Selain itu juga terdapat permasalahan terkait dengan anak dan perempuan yang lain yakni isu narkoba, trafficking, pornografi, pekerja anak, anak berhadapan dengan hukum, anak dan perempuan dalam konflik sosial maupun kondisi darurat bencana
- c. Belum terpenuhinya pemenuhan Hak Anak dan Hak Asuh Anak
- d. Belum seluruh Kabupaten/Kota yang mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

- e. Terbatasnya data terpilah yang digunakan dalam analisa pembangunan yang responsif gender
- f. Masih adanya Kabupaten/Kota yang belum konsisten dalam pelaksanaan pembangunan yang responsif gender

10. Urusan Pangan

- a. Ketersediaan pangan terbatas disebabkan berkurangnya kapasitas produksi pangan daerah karena berkurangnya lahan pertanian produktif.
- b. Penurunan kemampuan penyediaan pangan masih menjadi kendala disebabkan masih tingginya proporsi kehilangan hasil pada proses produksi, penanganan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil pertanian
- c. Diversifikasi pangan masyarakat maka ketergantungan pada pangan beras sampai saat ini konsumsi beras per kapita masih tergolong tinggi, perlu diseimbangkan minimal sama dengan rata-rata nasional dengan metode pola penganekaragaman konsumsi pangan (skor pola pangan harapan).
- d. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah yang dicirikan dengan pola konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang dan aman
- e. Masih ditemukan pangan yang belum aman dikonsumsi terutama pangan yang aman, sehat, utuh dan halal atau asuh, antara lain (1) masih terdapat pangan yang beredar belum memenuhi standar keamanan pangan, (2) penambahan pengawet pada bahan makanan (sept Formalin), (3) dari udara yang tercemar oleh gas dan debu knalpot kendaraan bermotor, (4) masih banyak pangan tidak segar beredar di pasaran, dan (5) lahan untuk produksi pangan utama terkontaminasi pestisida yang berlebihan
- f. Masih ada daerah yang mengalami kerawanan pangan yang disebabkan (1) ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan (2) ketersediaan pangan untuk penanganan daerah rawan pangan belum optimal
- g. Pendistribusian pangan belum merata kepada masyarakat terutama miskin, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas
- h. Tidak stabilnya harga dan rendahnya efisiensi sistem pemasaran hasil-hasil pangan disebabkan belum ada jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/beras
- i. Belum terpenuhinya kondisi pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau
- j. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan
- k. Masih rendahnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat
- l. Naiknya harga bahan pangan sehingga menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat
- m. Angka kemiskinan di Sumatera Barat mengalami penurunan namun akses pangan masyarakat belum terjamin
- n. Tingginya intensitas bencana alam yang berdampak serius terhadap tingkat kerawanan pangan masyarakat
- o. Rendahnya jaminan mutu dan keamanan pangan masyarakat serta masih lemahnya pengawasan keamanan pangan segar

11. Urusan Pertanahan

- a. Rendahnya Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah

- b. Saat ini, bila terjadi sengketa pertanahan antara dua pihak atau lebih dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dengan berperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada beberapa jenis pengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusan pengadilan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepastian hukum masyarakat terhadap hak atas tanah tidak dapat terjamin bahkan oleh lembaga peradilan yang ada
- c. Masih adanya Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
- d. Belum optimalnya Kinerja pelayanan pertanahan
- e. Minimnya ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum

12. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Menurunnya kualitas air sungai yang tadinya hanya ada pada perkotaan sekarang sudah dirasakan sampai perdesaan, begitupun dengan kualitas air danau khususnya danau maninjau dan danau singkarak
- b. Peningkatan jumlah timbunan sampah terutama pada daerah dengan tingkat ekonomi yang tinggi serta jumlah penduduk yang besar
- c. Meningkatnya alih fungsi lahan yang lebih disebabkan karena bertambah luasnya lahan pertambangan, perkebunan, permukiman serta berkurangnya lahan pertanian
- d. Belum tersedianya fasilitas pengelolaan limbah B3 medis dan non medis
- e. Masih terbatasnya cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin PPLH oleh Provinsi / kab/kota
- f. Kurangnya kepedulian pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi peraturan bidang lingkungan hidup

13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Data Adminduk belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder
- b. Sarana jaringan dan aplikasi untuk mendukung Adminduk belum seluruhnya terkoneksi dengan baik
- c. Sarana prasana dan kualitas SDM pengelola data dan pelayanan masih kurang
- d. Pemutakhiran data kependudukan belum optimal dilakukan oleh kabupaten/kota
- e. Ketersediaan blanko KTP_el belum konsisten memenuhi kebutuhan

14. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari belum berjalan secara optimal dikarenakan masih rendahnya SDM perangkat Desa/Nagari
- b. Masih kurangnya Peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat
- c. Masih kurangnya usaha ekonomi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat
- d. Kurang optimalnya pembentukan dan pengembangan kawasan perdesaan

15. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum meratanya kapasitas/kemampuan SDM aparatur, dalam pelaksanaan pelayanan Pengendalian Penduduk dan KB
- b. Belum optimalnya koordinasi anatar Provinsi dengan Pusat dan Kab/Kota

- c. Masih rendahnya keterlibatan dan peran serta organisasi masyarakat dan tokoh agama dalam upaya peningkatan dan pembangunan keluarga
- d. Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk, dan Keluarga Berencana
- e. Belum maksimal desain program dalam pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga;
- f. Komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KBKK masih rendah, yang ditandai dengan kurangnya pemahaman pemerintah pusat dan daerah tentang program KBKK, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan bidang KBKK dimasukan dalam perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KBKK.

16. Urusan Perhubungan

- a. Masih rendahnya kualitas pelayanan transportasi, yang disebabkan oleh belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik, belum maksimalnya pemberian subsidi terhadap pelayanan transportasi.
- b. Belum optimalnya pengawasan standar pelayanan transportasi serta belum memadainya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan transportasi.
- c. Belum maksimalnya Jangkauan Pelayanan Sarana Transportasi dalam Membangun Konektifitas Wilayah.
- d. Belum semua daerah kabupaten/kota memiliki transportasi publik, di samping itu belum adanya keterpaduan intra dan antar modal transportasi
- e. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
- f. Masih belum terwujudnya transportasi yang ramah lingkungan

17. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Masih kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- b. Belum optimalnya pengelolaan informasi daerah.
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
- d. Belum semua aplikasi yang terintegrasi
- e. Belum optimalnya pemanfaatan penggunaan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta belum terpenuhinya SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi baik dari segi kualitas maupun kuantitas

18. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Masih banyaknya koperasi yang kelengkapan legalitasnya belum lengkap
- b. Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar
- c. Masih kurangnya kapasitas SDM notaris terkait peralihan kewenangan pengesahan pendirian koperasi dan perubahan anggaran dasar dari sisminbhkop
- d. Stigma koperasi di tengah masyarakat masih dianggap sebagai organisasi yang kurang bermanfaat sehingga menghambat kemajuan koperasi
- e. Belum maksimalnya sinergi dengan berbagai pihak dalam pengembangan usaha sektor riil koperasi
- f. Masih rendahnya kemampuan pelaku UKM dalam penguasaan IT untuk pengembangan pemasaran secara online

- g. Masih banyaknya pelaku UKM yang belum memahami tentang program skim kredit perbankan dan non perbankan
- h. Terbatasnya modal UKM dan terbatasnya promosi yang bisa diikuti oleh UKM

19. Urusan Penanaman Modal

- a. Pelayanan terhadap penanam modal (investor) masih belum optimal, karena masih kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur terutama yang bersifat teknis agar dapat bekerja secara profesional dan masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan penanaman modal
- b. Data dan Informasi Potensi daerah yang dipromosikan kepada calon investor belum akurat.
- c. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN serta masih banyaknya perusahaan PMA/PMDN yang belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- d. Dokumen perencanaan pendukung investasi di daerah yang dibutuhkan oleh calon investor belum memadai.
- e. Perusahaan PMA/PMDN masih kurang terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya dan tidak melaporkannya ke Tim Task Force Investasi.
- f. Keuangan negara dan keuangan daerah belum mampu mencukupi kebutuhan pembangunan infrastruktur publik, fasilitas kesehatan, sanitasi dan pendidikan yang memadai serta untuk pembiayaan upaya-upaya peningkatan penanaman modal.
- g. Masih belum terwujudnya jaminan stabilitas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten, lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga, disamping itu efisiensi peradilan dalam penyelesaian sengketa masih rendah dan biaya untuk mendapatkan kepastian hukum dari peradilan di Indonesia relatif tinggi, dibandingkan negara-negara di Asia, peradilan di Indonesia termasuk lama dalam penyelesaian sengketa usaha.

20. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Rendahnya kapasitas dan daya saing pemuda berwirausaha
- b. Masih rentannya Karakter dan Jati Diri Pemuda dalam hal menyikapi perkembangan teknologi.
- c. Rendahnya partisipasi Pemuda dalam Kepramukaan
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- e. Rendahnya Kualitas Atlit dan Pelatih
- f. Terbatasnya SDM Olahraga
- g. Kurangnya pelaksanaan kompetisi olahraga

21. Urusan Statistik

- a. Belum tersedianya ASN fungsional Statistisi untuk pelaksana pengelolaan data statistik sektoral
- b. Belum adanya interoperabilitas data statistik sektoral antar sistem informasi sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia
- c. Masih rendahnya tingkat keterisian data statistik sektoral oleh produsen data
- d. Belum terpenuhinya standar data, metadata dan kode referensi data statistik sektoral

22. Urusan Persandian

- a. Belum tersedianya ASN fungsional Sandiman serta belum tersedianya ASN untuk pengelolaan keamanan informasi pada seluruh perangkat daerah
- b. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi
- c. Belum tersusunnya arsitektur keamanan informasi

23. Urusan Kebudayaan

Penerapan nilai-nilai budaya daerah di masyarakat belum optimal antara lain disebabkan oleh pemahaman masyarakat masih kurang, rendahnya minat generasi muda terhadap budaya daerah, belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya, belum optimalnya promosi budaya, minimnya apresiasi seni dan kreatifitas karya budaya, serta belum optimalnya pembinaan lembaga adat

24. Urusan Perpustakaan

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan kepastakaan.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan minat baca

25. Urusan Kearsipan

- a. Masih kurang dan belum meratanya SDM arsiparis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan pekerjaan pengelolaan arsip banyak dilakukan oleh orang yang belum mengerti tentang pengelolaan arsip.
- b. Masih rendahnya pemahaman perangkat daerah tentang pentingnya pengamanan dan pengelolaan arsip
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana kearsipan sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 114 Tahun 2008, Tentang Pedoman Penggunaan Peralatan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

B. Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil sehingga mempengaruhi jumlah tangkapan ikan.
- b. Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten.
- c. Terbatasnya sarana dan akses permodalan dalam usaha penangkapan, budidaya dan pengolahan hasil perikanan.
- d. Terbatasnya ketersediaan jumlah induk unggul di Sumatera Barat, sehingga masih harus mendatangkan induk unggul dari luar Sumatera Barat diantaranya pulau Jawa,
- e. Tingginya harga pakan bagi pembudidaya ikan yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan, daya tahan dan perkembangan ikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap tingkat produksi dan produktifitas.
- f. Bencana alam yang masih sulit untuk dikendalikan, seperti banjir, tubo belerang, galodo, hama dan penyakit ikan dan lain-lain yang mempengaruhi terhadap produksi budidaya.

- g. Masih belum optimalnya SDM pembudidaya ikan dan masih sederhanya teknologi yang digunakan dalam penerapan cara budidaya ikan yang baik
- h. Masih rendahnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi era pasar bebas hasil perikanan.
- i. Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat yang berada di wilayah pesisir
- j. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan

2. Urusan Pariwisata

- a. Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas masih belum memadai.
- b. Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana pra sarana dimiliki) sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata.
- c. Koordinasi Lintas Sektor (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.
- d. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- e. Terbatasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengembangan objek wisata di daerah
- f. Masih perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk penguatan Sumatera Barat dalam penyelenggaraan wisata halal

3. Urusan Pertanian

- a. Daya saing produk pertanian relatif masih rendah terhadap produk impor
- b. Belum meningkatnya nilai tambah produk pertanian
- c. Produktivitas pertanian masih perlu peningkatan
- d. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian
- e. Masih tingginya kehilangan hasil produksi pertanian
- f. Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti benih dan saprodi.
- g. Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD pertanian
- h. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- i. Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum
- j. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polyvalen masih kurang
- k. Ancaman wabah penyakit menular (flu burung dan jembrana)
- l. Daya saing produk peternakan relatif masih rendah
- m. Belum berkembangnya nilai tambah produk peternakan
- n. Produktivitas dan populasi peternakan masih perlu peningkatan
- o. Aksesibilitas petani peternak terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas

- p. Masih ditemui permasalahan ketersediaan dan keterjangkauan sarana produksi seperti bibit, obat-obatan, pakan ternak
 - q. Belum optimalnya sarana dan prasarana UPTD peternakan (Puskeswan, Perbibitan, RPH, Pos IB)
 - r. Rendahnya kemampuan petani peternak dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
 - s. Masih banyak kelembagaan petani peternak yang belum berbentuk badan hukum
4. Urusan Kehutanan
- a. Tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dan konflik penggunaan kawasan hutan masih sangat tinggi
 - b. Keberadaan kawasan hutan (termasuk batas-batasnya di lapangan) belum seluruhnya diakui oleh para pihak/ masyarakat
 - c. Belum tersedianya data hasil potensi kawasan hutan (flora dan fauna) sebagai dasar perencanaan kehutanan dan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi
 - d. Belum optimalnya penanganan terhadap Kondisi kekritisitas DAS prioritas dan sebaran lahan kritis di wilayah Sumatera Barat
 - e. Belum optimalnya promosi, investasi dan regulasi kehutanan dalam pemanfaatan hutan
 - f. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan belum optimal sehingga penerimaan bukan pajak termasuk jasa lingkungan sektor kehutanan masih relatif rendah
 - g. Masih lemahnya koordinasi dan sinergitas kelembagaan pemangku kepentingan pengelolaan hutan
 - h. Perlu optimalisasi sistem informasi yang berkualitas untuk pembangunan kehutanan
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
- a. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
 - b. Belum memadainya ketersediaan dan keterjangkauan infrastruktur kelistrikan di sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan
 - c. Terbatasnya pendanaan/investasi baik dari Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan potensi energi baru terbarukan
 - d. Masih rendahnya Ratio Elektrifikasi dan cakupan layanan listrik dari nasional
 - e. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral
 - f. Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral
 - g. Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat
 - h. Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar
 - i. Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat sehingga terjadi Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan
 - j. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi air tanah
6. Urusan Perdagangan
- a. Ekspor masih terkonsentrasi pada beberapa komoditi tertentu seperti barang setengah jadi dan belum pada hasil hilirisasi produk

- b. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen serta belum optimalnya pengawasan barang dan jasa
- c. Ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang belum memadai, seperti pasar tradisional yang perlu direhabilitasi, pusat kuliner dan lain-lain
- d. Kurangnya ketersediaan barang pokok yang menyebabkan tingginya harga pada kondisi tertentu yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat
- e. Masih banyak ditemui barang beredar yang tidak memenuhi ketentuan, seperti barang yang tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kadaluarsa, tanda SNI, manual dan garansi
- f. Masih rendahnya kualitas sarana pasar rakyat

7. Urusan Perindustrian

- a. Daya saing produk IKM yang dihasilkan masih relatif rendah dari sisi kemasan, standar dan mutu produk.
- b. Inovasi dan diversifikasi produk industri kecil menengah masih rendah
- c. Keakuratan data industri dari kabupaten/kota masih lemah
- d. Belum optimalnya pengembangan industri sesuai potensi daerah

8. Urusan Transmigrasi

- a. Kemampuan dan komitmen Pemerintah Daerah tentang transmigrasi semakin rendah akibatnya perkembangan kawasan transmigrasi semakin menurun.
- b. Terbatasnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan transmigrasi baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga pelaksanaan kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
- c. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dianggap mengambat optimalisasi pengembangan kawasan transmigrasi karena telah terbagi setiap tahapan dengan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini dikarenakan penyelenggaraan transmigrasi tidak bisa dibagi dengan kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- d. Terkait dengan penyelesaian permasalahan lahan transmigrasi adanya pembatasan kewenangan Provinsi yang hanya bisa mengintervensi Kawasan Transmigrasi yang lintas Kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, padahal selama ini penyelesaian permasalahan lahan tetap melibatkan provinsi dan Kabupaten

C. Urusan Penunjang

1. Fungsi Pengawasan

- a. Masih kurangnya respon auditan dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat
- b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya sesuai PP 60 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2009
- c. Terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional dibandingkan dengan beban kerja pemeriksaan yang semakin meningkat
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana yang representative dalam pelaksanaan tugas-tugas pengawasan untuk menjalani tugas dan fungsi pengawasan

2. Fungsi Perencanaan
 - a. Terbatasnya ketersediaan dan belum optimalnya pemanfaatan SDM Perencana baik secara kuantitas dan kualitas.
 - b. Belum optimalnya penyelenggaraan proses perencanaan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.
 - d. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi program/kegiatan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang
3. Fungsi Keuangan
 - a. Pencapaian realisasi PAD belum sesuai dengan target PAD pada RPJMD.
 - b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabilitas.
 - c. Masih terdapat gangguan jaringan dalam sistem pengelola keuangan maupun pajak daerah yang dapat mengganggu pelayanan publik.
 - d. Dalam penyampaian laporan kegiatan masih adanya perbedaan data.
 - e. Belum terinformasikannya regulasi yang baru ditetapkan terkait dengan redistribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah untuk ASN pengelola redistribusi daerah dan PAD yang sah.
 - f. Masih terbatasnya sarana dalam pemungutan pajak seperti belum tersedianya mobil Samsat Keliling untuk masing-masing UPTD.
 - g. Masih belum optimalnya partisipasi pihak ketiga dalam mewujudkan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan lain-lain
4. Fungsi Kepegawaian
 - a. Jumlah ASN secara kuantitas dan kualitas belum mencukupi kebutuhan perangkat daerah, dimana masih didominasi oleh tenaga administrative yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jabatan fungsional tertentu (selain tenaga kependidikan dan kesehatan) serta terbatasnya ASN yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan perangkat daerah
 - b. Masih belum maksimalnya sinergitas antara pengelola kepegawaian provinsi dengan kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan Manajemen kepegawaian berbasis sistem merit
 - c. Implementasi reward dan punishment sebagai alat pembinaan dan implementasi kedisiplinan ASN belum berjalan optimal yang didukung dengan kriteria dan ukuran yang tepat dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja ASN
 - d. Belum optimalnya pola pengembangan/pembinaan karir yang berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, diklat dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
 - e. Belum optimalnya pengembangan Simpeg untuk pengelolaan data kepegawaian dan perlunya dilakukan integrasi data kepegawaian dengan stakeholder bidang kepegawaian
 - f. Peningkatan layanan kepegawaian berbasis elektronik (less paper) dalam rangka percepatan pelayanan kepegawaian
 - g. Belum optimalnya penyusunan kebutuhan (formasi) ASN didasarkan kepada analisa jabatan dan beban kerja, sehingga rekrutmen ASN belum dapat menutupi kekurangan ASN secara kualitas dan kuantitas

- h. Belum optimalnya pembinaan ASN secara menyeluruh dan berkala sesuai kebutuhan perangkat daerah
 - i. Belum optimalnya pengelolaan mutasi jabatan sesuai dengan sistem merit
5. Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
- a. Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kualifikasi pejabat pengembannya yang antara lain dikarenakan Pejabat administrator dan pengawas masih banyak yang belum mengikuti diklat kepemimpinan serta Calon Pegawai Negeri masih banyak yang belum mengikuti Diklat Prajabatan
 - b. Keahlian dan keterampilan pejabat pelaksana (JFU) dalam mewujudkan kinerja OPD masih rendah yang antara lain dapat diindikasikan dari masih banyaknya keluhan tentang pelaksanaan pelayanan publik dan mental melayani, sulitnya mendapatkan ASN yang memiliki kemampuan pengadaan barang dan jasa, menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pengelolaan keuangan, mekanisme pelaporan kerja, pengelolaan aset, dan pengelola kepegawaian OPD yang menguasai AKD
 - c. Masih rendahnya pemenuhan formasi jabatan fungsional tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing) yang mengamanatkan bahwa setiap PNS hendaknya dipersiapkan menjadi pejabat fungsional tertentu.
 - d. Masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk bisa melaksanakan inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing).
 - e. Sarana dan prasarana pendukung kediklatan belum memenuhi standar akreditasi terbaik dari Lembaga Administrasi Negara.
 - f. Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat
6. Fungsi Penelitian dan Pengembangan
- a. Belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas, kapasitas maupun kualitas.
 - b. Sarana dan prasarana kelitbangan yang masih minim.
 - c. Jaringan kelitbangan yang masih terbatas.
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam pengambilan kebijakan.
 - e. Minimnya fasilitasi penyaluran hasil inovasi teknologi kepada pengguna

1.2.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2021-2026. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang akan diwujudkan pada akhir tahun 2026 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Misi Gubernur Sumatera Barat pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Visi dan Misi menjadi gambaran otentik Provinsi

Sumatera Barat dalam 5 tahun (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 (SESUAI RPJP) adalah “***Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025***”.

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2019-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut jelaskan pengertian sebagai berikut:

Terkemuka

Dalam hal ini diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat Sumatera Barat yang sudah maju yang ditandai dengan tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang tinggi dan merata. Dalam pengertian ini, tingkat kemajuan ini juga dapat diperlihatkan melalui perkembangan teknologi yang modern dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat berkomunikasi dan bergaul secara nasional maupun internasional dalam kesetaraan. Tingkat kemajuan ini juga ditandai dengan sumber daya insani yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam ekonomi dan sosial. Akhirnya pembangunan manusia di daerah ini menghasilkan tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi serta terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan yang berkembang dalam masyarakat. Termasuk ke dalam unsur kemajuan ini adalah kesejahteraan diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang sudah cukup makmur yang ditandai oleh pendapatan masyarakat yang cukup tinggi, berbadan sehat dan kuat, tingkat pengangguran dan kemiskinan sudah sangat rendah, mempunyai distribusi pendapatan yang lebih merata dan adil, mempunyai kesempatan berusaha yang sama antara golongan pengusaha, pemerintahan sudah berjalan secara demokratis, taat dan sadar hukum, terdapatnya kesamaan peranan pria dan wanita (kesetaraan gender), mempunyai fasilitas pelayanan sosial yang cukup merata dan berkualitas baik, adanya jaminan sosial yang cukup untuk orang cacat dan penduduk usia lanjut, serta terdapatnya kualitas lingkungan hidup yang baik, hijau, lestari dengan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Pengertian **agamais** dalam Visi Sumatera Barat dua puluh tahun ke depan, diartikan tidak hanya untuk sumber daya manusia saja, tetapi juga secara keseluruhan untuk pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Dimana kondisi masyarakat yang agamais sebagai sumber motivasi, inspirasi untuk diamanatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya IPTEKS, pertahanan, keamanan, lingkungan, sehingga terwujudnya Sumatera Barat yang modern dan beradab. Masyarakat yang agamais juga ditandai oleh adanya keseimbangan dinamis antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual. Dengan demikian, disamping untuk persiapan menghadapi akhirat, agama dan adat juga akan dapat pula dijadikan sebagai sumber energi untuk menggerakkan proses pembangunan daerah secara menyeluruh.

Berbasis Sumberdaya Manusia

Sebagai landasan umum pembangunan daerah sengaja dipilih karena pola pembangunan ini diperkirakan sebagai cara yang tepat sesuai dengan kondisi daerah guna dapat mewujudkan

visi jangka panjang daerah. Alasannya adalah karena Provinsi Sumatera Barat tidak mempunyai sumber daya alam bernilai tinggi seperti minyak dan gas, batubara yang berskala ekonomis. Potensi yang dimiliki oleh daerah adalah dalam bentuk sumber daya manusia berjumlah cukup besar dengan kualitas relatif lebih baik. Karena itu, visi pembangunan daerah diperkirakan akan lebih mungkin dapat dicapai melalui pembangunan manusia. Sedangkan kegiatan pembangunan manusia tersebut mencakup pembangunan di bidang agama, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama yang ingin dicapai melalui pembangunan manusia ini adalah meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berdaya saing, meningkatnya produktivitas kerja dan penyerapan tenaga kerja yang menuju pada terwujudnya kesejahteraan sosial yang menyeluruh meliputi kemakmuran ekonomi dan sosial sekaligus dengan indikator yang jelas berbasis data penduduk.

Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah. Berdasarkan pengertian ini maka misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

2. Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi.

Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berakarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

4. Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global.

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

5. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

1.2.3 Program Pembangunan Daerah

Indikasi rencana program pembangunan merupakan upaya-upaya yang akan ditempuh dan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam implementasinya secara operasional, program-program tersebut dijabarkan kedalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Program-program tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas Perangkat Daerah dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun, yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah langsung dalam pencapaian Visi, Misi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Program pembangunan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan indikator kinerja daerah dikelompokkan ke dalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Urusan : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sosial, Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan : tenaga kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan dan Arsip. Terkait dengan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yaitu Urusan : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Rincian program pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang dijabarkan menurut 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah dengan 204 program pembangunan secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.4
Program Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan RPJMD 2016-2021

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
1.	Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	1. Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Diversifikasi Pangan 3. Peningkatan Produksi dan produktivitas 4. Peningkatan Produksi dan Produktivitas 5. Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim 6. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis 7. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis 8. Peningkatan Produksi dan Produktivitas 9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM 10. Pengamanan sumber daya hewani

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur	1. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 2. Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral 3. Penyediaan dan pengolahan air baku 4. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota
	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	1. Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam 2. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 3. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 4. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya
	Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan	1. Pengembangan Perikanan Ekonomi Maritim 2. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis 3. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut 4. Rehabilitasi, Konservasi, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan
	Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi	1. Pengembangan kewilayahan industri 2. Pengembangan industri kecil dan menengah 3. Peningkatan Kualitas Produk Industri 4. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 5. Peningkatan dan pengembangan daya saing koperasi 6. Peningkatan dan pengembangan daya saing UMKM 7. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 8. Pengembangan perdagangan dalam negeri 9. Peningkatan dan pengembangan perdagangan luar negeri
	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha 3. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium 4. Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja 5. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
2	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur pada Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 2. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	Peningkatan Derajat Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
	Masyarakat	
	Peningkatan Produksi untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis
3	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Keluarga Berencana 2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi Remaja 3. Penyiapan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 4. Peningkatan Pengendalian Kependudukan 5. Obat dan Perbekalan Kesehatan 6. Upaya Kesehatan Masyarakat 7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Perbaikan Gizi Masyarakat 9. Pengembangan Lingkungan Sehat 10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular 11. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 12. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 13. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan 14. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 15. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16. Peningkatan Pelayanan BLUD 17. Standarisasi pelayanan kesehatan 18. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 19. Peningkatan Perlindungan Perempuan 20. Peningkatan Kualitas Keluarga 21. Peningkatan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Anak 22. Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak 23. Peningkatan Perlindungan Khusus Anak
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Pendidikan 2. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 3. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus 4. Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan 5. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 6. Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan 7. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah
	Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta	1. Pemberdayaan Fakir Miskin 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
	Penanganan Daerah Tertinggal	4. Pembinaan anak terlantar 5. Pembinaan para penyandang disabilitas dan eks trauma 6. Pembinaan panti lanjut usia terlantar 7. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 8. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 9. Pemberdayaan fakir miskin 10. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pada kawasan khusus dan daerah tertinggal 11. Pembinaan Panti Lanjut Usia Terlantar 12. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Wanita Tuna Susila, Dan Penyakit Sosial Lainnya) 13. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 14. Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial 15. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 16. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 17. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Usaha 18. Pengadaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Laboratorium 19. Perlindungan Tenaga Kerja dan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja 20. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 21. Peningkatan Mutu, relevansi dan Daya Saing Pendidikan Menengah
4	Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat	1. Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-nilai Agama 2. Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 3. Pendidikan Karakter 4. Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 5. Pemberdayaan kelembagaan Masyarakat adat 6. Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat Seni dan Budaya 7. Pengembangan dan Penguatan Nilai Budaya 8. Pemberdayaan dan Penguatan Eksistensi Lembaga-Lembaga Adat, Seni dan Budaya 9. Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Budaya 10. Pengelolaan Kekayaan Budaya 11. Peningkatan Diplomasi Seni dan Budaya 12. Peningkatan Wawasan dan Kreatifitas Seni Budaya Pemuda 13. Pengembangan dan perlindungan bahasa daerah
5	Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta	1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi 2. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
	pembangunan infrastruktur	3. Peningkatan sarana prasarana kebinamargaan 4. Penyediaan dan pengolahan air baku 5. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional 6. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi 7. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 8. Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota 9. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 10. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 11. Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 12. Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan
	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	1. Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah 2. Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan 3. Peningkatan penyediaan data statistik sektoral
	Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan	1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah 2. Peningkatan Akses, Pemerataan dan Mutu Sekolah Menengah Kejuruan 3. Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
6	Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam	1. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 2. Tata Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 3. Peningkatan kualitas dan akses Informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 4. Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan. 5. Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan 6. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 7. Pemantapan Kawasan Hutan 8. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 9. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam 10. Perencanaan dan Pengembangan Hutan 11. Perhutanan Sosial dan Kemitraan 12. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan 13. Pengelolaan, pengembangan konservasi air tanah 14. Pengendalian Kebakaran Hutan 15. Peningkatan mitigasi bencana. 16. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 17. Pemetaan daerah rawan kebakaran 18. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan
		19. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Kewenangan Provinsi lainnya 20. Penanganan Tanggap Darurat Bencana 21. Pemulihan daerah pasca bencana
7	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan	1. Pembinaan dan pengembangan aparatur 2. Peningkatan Manajemen SDM Aparatur 3. Peningkatan fungsi pengawasan dan penegakan hukum 4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat 5. Manajemen Perubahan 6. Penataan Kelembagaan Daerah Pemerintah Daerah 7. Pengelolaan Otonomi Daerah 8. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah 9. Implementasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 10. Pengelolaan e-Government Pemerintah Daerah 11. Pengamanan Informasi Pemerintah dan persandiaan 12. Peningkatan penyediaan data statistik sektoral 13. Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik 14. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 15. Peningkatan Pendapatan Daerah 16. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota 17. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 18. Pembangunan Materi Hukum 19. Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM 20. Peningkatan Supremasi Hukum dan Perlindungan Hukum 21. Sarana dan Informasi Hukum 22. Peningkatan Penataan Perundang-undangan

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,39	72,38
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,28	6,56
3.	Angka Pengangguran (ribu orang)	144,35	190,61
4.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,01	-1,60
5.	PDRB per Kapita (ADHB) (Rp.juta)	45,21	44,03
6.	Ketimpangan Pendapatan	0.307	0.301

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

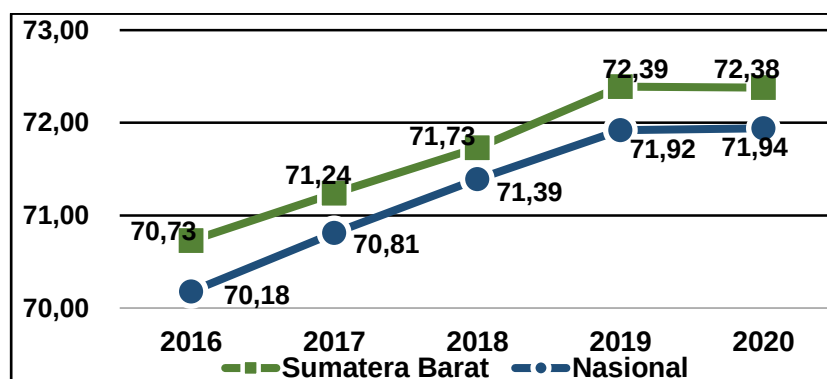
Secara umum, Perkembangan IPM Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2020 terus meningkat, dimana IPM Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 72,38 dan masih baik dibandingkan rata-rata IPM nasional (71,94), dengan ranking IPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 menduduki peringkat ke-9 secara nasional setelah Provinsi Banten. Untuk Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat menduduki peringkat ke-3 setelah Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau. Perbandingan IPM antar kabupaten/kota tahun 2020, IPM tertinggi adalah Kota Padang sebesar 82,82 dan IPM terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 61,09. Hal ini memberikan indikasi bahwa terjadi perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam kurun waktu tersebut. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan komponennya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.1
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

NO	KOMPONEN IPM	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99
4	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rp/ Org/Th	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733
IPM PROV. SUMATERA BARAT			70,73	71,24	71,73	72,39	72,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Grafik 2.1
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
Dibandingkan dengan Nasional Tahun 2016-2020



Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami dinamika, ada yang naik dan ada yang mengalami penurunan pada tahun 2020. Perbandingan IPM antar kabupaten/kota pada tahun 2020, IPM tertinggi adalah Kota Padang sebesar 82,82 dan IPM terendah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 61,09. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia se Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel berikut :

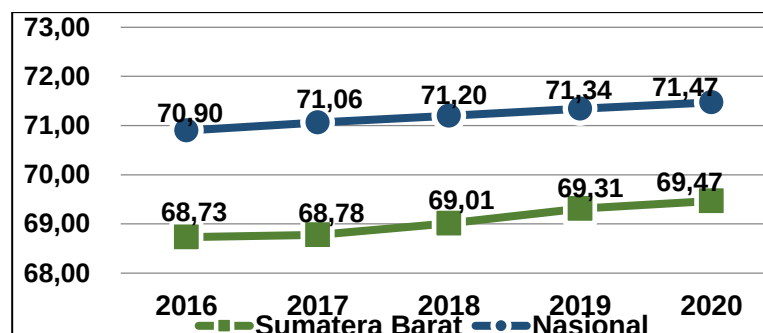
Tabel 2.2
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat
Tahun 2016-2020

NO.	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Kepulauan Mentawai	58,27	59,25	60,28	61,26	61,09
2	Kab. Pesisir Selatan	68,39	68,74	69,40	70,08	69,90
3	Kab. Solok	67,67	67,86	68,60	69,08	69,08
4	Kab. Sijunjung	66,01	66,60	66,97	67,66	67,74
5	Kab. Tanah Datar	70,11	70,37	71,25	72,14	72,33
6	Kab. Padang Pariaman	68,44	68,90	69,71	70,59	70,61
7	Kab. Agam	70,36	71,10	71,70	72,37	72,46

NO.	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
8	Kab. Lima Puluh Kota	68,37	68,69	69,17	69,67	69,47
9	Kab. Pasaman	64,57	64,94	65,60	66,46	66,64
10	Kab. Solok Selatan	67,47	67,81	68,45	68,94	69,04
11	Kab. Dharmasraya	70,25	70,40	70,86	71,52	71,51
12	Kab. Pasaman Barat	66,03	66,83	67,43	68,21	68,49
13	Kota Padang	81,06	81,58	82,25	82,68	82,82
14	Kota Solok	77,07	77,44	77,89	78,38	78,29
15	Kota Sawahlunto	70,67	71,13	71,72	72,39	72,64
16	Kota Padang Panjang	76,50	77,01	77,30	78,00	77,93
17	Kota Bukittinggi	79,11	79,80	80,11	80,71	80,58
18	Kota Payakumbuh	77,56	77,91	78,23	78,95	78,90
19	Kota Pariaman	75,44	75,71	76,26	76,70	76,90

Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan UHH secara nasional. UHH Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 69,47 tahun, namun angka ini masih di bawah Nasional. Sementara untuk perbandingan UHH antar kabupaten/kota tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, UHH tertinggi berada di Kota Bukittinggi yaitu sebesar 80,58 tahun lebih tinggi dari UHH provinsi dan nasional, dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 64,73 Tahun. Perkembangan UHH Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Perkembangan UHH Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dapat dilihat pada Grafik dan Tabel berikut :

Grafik 2.2
Perkembangan Umur Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional
Tahun 2016-2020 (Tahun)



Tabel 2.3
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Tahun)

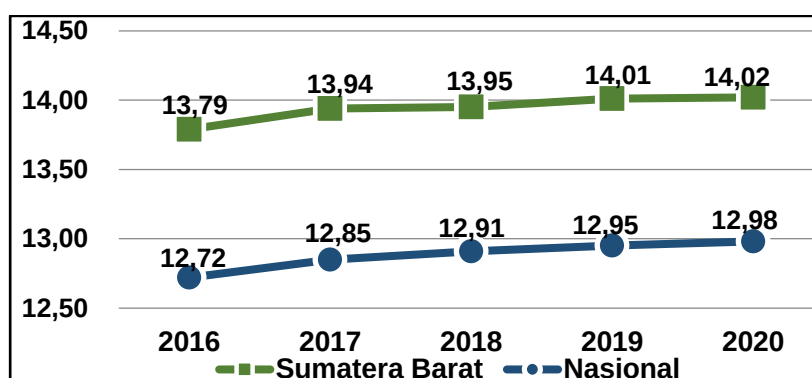
NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Kepulauan Mentawai	64,36	64,37	64,49	64,68	64,73
2	Kab. Pesisir Selatan	70,11	70,23	70,45	70,73	70,86
3	Kab. Solok	67,50	67,65	67,95	68,34	68,58
4	Kab. Sijunjung	65,33	65,44	65,69	66,02	66,21
5	Kab. Tanah Datar	68,93	69,11	69,38	69,73	69,94

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
6	Kab. Padang Pariaman	67,80	67,96	68,23	68,58	68,79
7	Kab. Agam	71,44	71,57	71,83	72,17	72,37
8	Kab. Lima Puluh Kota	69,27	69,31	69,47	69,70	69,79
9	Kab. Pasaman	66,40	66,54	66,82	67,18	67,40
10	Kab. Solok Selatan	66,78	66,92	67,21	67,58	67,81
11	Kab. Dharmasraya	70,30	70,44	70,73	71,10	71,33
12	Kab. Pasaman Barat	67,09	67,15	67,37	67,67	67,82
13	Kota Padang	73,19	73,20	73,35	73,57	73,65
14	Kota Solok	72,83	72,92	73,14	73,45	73,61
15	Kota Sawahlunto	69,33	69,39	69,59	69,87	70,00
16	Kota Padang Panjang	72,45	72,46	72,58	72,77	72,82
17	Kota Bukittinggi	73,60	73,69	73,91	74,22	74,38
18	Kota Payakumbuh	73,03	73,13	73,33	73,61	73,74
19	Kota Pariaman	69,63	69,67	69,87	70,15	70,28

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan HLS secara nasional. HLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 14,02 tahun, angka ini di atas angka Nasional. Sementara untuk perbandingan HLS antar kabupaten/kota tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, HLS tertinggi berada di Kota Padang yaitu sebesar 16,52 tahun lebih tinggi dari HLS provinsi dan nasional, dan terendah di Kabupaten Sijunjung yaitu sebesar 12,7 Tahun. Perkembangan HLS Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Perkembangan HLS Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dapat dilihat pada Grafik dan Tabel berikut :

Grafik 2.3

Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional Tahun 2016-2020 (Tahun)



Tabel 2.4

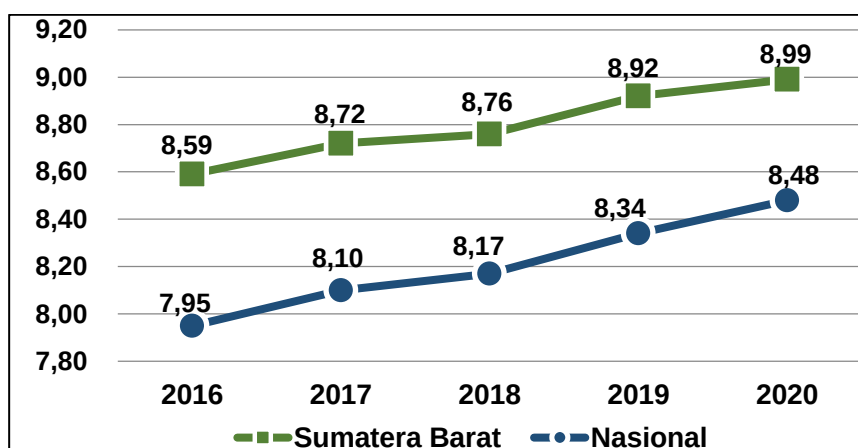
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Tahun)

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Kepulauan Mentawai	11,74	12,07	12,39	12,76	12,82

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
2	Kab. Pesisir Selatan	13,05	13,06	13,30	13,31	13,32
3	Kab. Solok	13,00	13,01	13,02	13,03	13,04
4	Kab. Sijunjung	12,27	12,34	12,35	12,36	12,37
5	Kab. Tanah Datar	13,46	13,59	13,88	14,32	14,33
6	Kab. Padang Pariaman	13,55	13,56	13,57	13,62	13,67
7	Kab. Agam	13,73	13,94	13,85	13,86	13,87
8	Kab. Lima Puluh Kota	13,25	13,26	13,27	13,28	13,29
9	Kab. Pasaman	12,71	12,72	12,78	12,79	12,80
10	Kab. Solok Selatan	12,51	12,68	12,69	12,70	12,71
11	Kab. Dharmasraya	12,39	12,40	12,41	12,42	12,43
12	Kab. Pasaman Barat	12,67	13,06	13,22	13,40	13,61
13	Kota Padang	15,87	16,15	16,50	16,51	16,52
14	Kota Solok	14,28	14,29	14,30	14,31	14,32
15	Kota Sawahlunto	13,05	13,14	13,15	13,16	13,17
16	Kota Padang Panjang	15,02	15,03	15,04	15,05	15,06
17	Kota Bukittinggi	14,93	14,94	14,95	14,96	14,97
18	Kota Payakumbuh	14,22	14,23	14,24	14,25	14,26
19	Kota Pariaman	14,50	14,51	14,52	14,53	14,54

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun terakhir meningkat, sejalan dengan perkembangan RLS secara nasional. RLS Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mencapai 8,99 tahun, angka ini di atas angka Nasional. Sementara untuk perbandingan RLS antar kabupaten/kota tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, RLS tertinggi berada di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 11,62 tahun lebih tinggi dari RLS provinsi dan nasional, dan terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 7,09 Tahun. Perkembangan RLS Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional dan Perkembangan RLS Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat dapat dilihat pada Grafik dan Tabel berikut :

Grafik 2.4
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat dengan Nasional
Tahun 2016-2020 (Tahun)



Tabel 2.5
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Tahun)

NO	KABUPATEN/KOTA	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Kepulauan Mentawai	6,52	6,69	6,95	7,08	7,09
2	Kab. Pesisir Selatan	8,12	8,13	8,14	8,25	8,26
3	Kab. Solok	7,58	7,60	7,84	7,85	7,86
4	Kab. Sijunjung	7,50	7,72	7,77	8,10	8,11
5	Kab. Tanah Datar	8,12	8,14	8,44	8,45	8,61
6	Kab. Padang Pariaman	7,00	7,21	7,50	7,86	7,87
7	Kab. Agam	8,18	8,39	8,69	8,85	8,96
8	Kab. Lima Puluh Kota	7,92	7,96	7,97	7,98	7,99
9	Kab. Pasaman	7,64	7,65	7,66	7,86	8,09
10	Kab. Solok Selatan	7,99	8,00	8,15	8,16	8,28
11	Kab. Dharmasraya	8,23	8,24	8,25	8,46	8,47
12	Kab. Pasaman Barat	7,84	7,85	7,86	8,06	8,19
13	Kota Padang	11,24	11,32	11,33	11,34	11,58
14	Kota Solok	10,79	10,95	11,01	11,02	11,03
15	Kota Sawahlunto	9,92	9,93	9,94	9,97	10,17
16	Kota Padang Panjang	11,42	11,43	11,44	11,45	11,62
17	Kota Bukittinggi	10,98	11,30	11,31	11,32	11,33
18	Kota Payakumbuh	10,30	10,45	10,46	10,72	10,73
19	Kota Pariaman	10,09	10,10	10,36	10,37	10,59

2.1.2 Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah, karena dari tingkat kemiskinan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera pada dasarnya merupakan tujuan dari pembangunan daerah. Begitu juga halnya dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, penurunan tingkat kemiskinan dijadikan salah satu dari prioritas RPJMD. Menurut data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dikeluarkan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat pada periode Maret dan September setiap tahunnya yang dirilis dalam Berita Resmi Statistik, bahwa untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Berdasarkan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan data berita release BPS, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada kondisi September 2020 adalah 364,79 ribu jiwa, bertambah sebesar 20,6 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2020 yang sebesar 343,09 ribu orang.

Dari presentase tingkat kemiskinan, capaian September 2020 yang sebesar 6,56% mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan September 2019 sebesar 6,29% atau sekitar 0,27%, dan jika dibandingkan dengan Maret 2020 dengan capaian 6,28 % atau naik sebesar 0,28%.

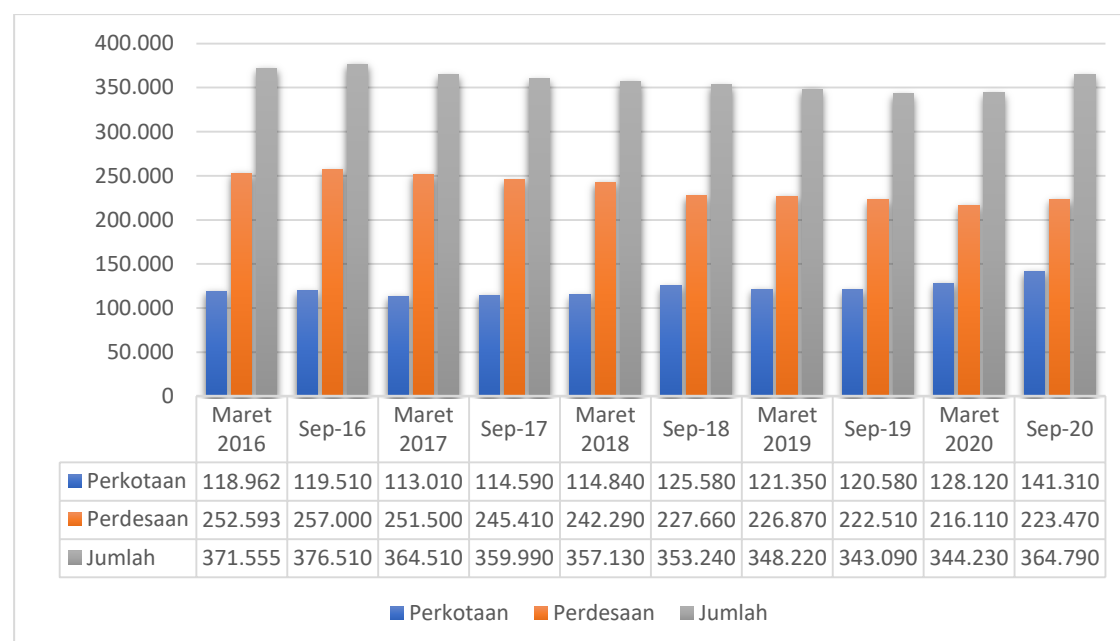
Jika dilihat dari jumlah penduduk miskin pada September 2020 di Provinsi Sumatera Barat menurut daerah tempat tinggal, selama periode Maret 2020-September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 13,19 ribu orang (dari 128,12 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 141,31 ribu orang pada September 2020), sementara di daerah perdesaan juga mengalami kenaikan sebanyak 7,36 ribu orang (dari 216,11 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 223,47 ribu orang pada September 2020).

Tabel 2.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Maret 2016 – September 2020

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN		
	PERKOTAAN	PERDESAAN	JUMLAH	PERKOTAAN	PERDESAAN	JUMLAH
Maret 2016	118.962	252.593	371.555	5,54	8,16	7,69
Sept 2016	119.510	257.000	376.510	5,52	8,27	7,14
Maret 2017	113.010	251.500	364.510	5,14	8,10	6,87
Sept 2017	114.590	245.410	359.990	5,11	7,94	6,75
Maret 2018	114.840	242.290	357.130	4,86	8,07	6,65
Sept 2018	125.580	227.660	353.240	4,99	7,9	6,55
Maret 2019	121.350	226.870	348.220	4,76	7,88	6,42
Sept 2019	120.580	222.510	343.090	4,71	7,69	6,29
Maret 2020	128.120	216.110	344.230	4,97	7,43	6,28
Sept 2020	141.310	223.470	364.790	5,22	7,83	6,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Grafik 2.5
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat
Kondisi Maret dan September 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat

Jika dibandingkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat dengan Nasional sejak tahun 2016 sampai 2020, data dari BPS menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Sumatera Barat lebih rendah daripada nasional, yaitu pada tahun 2016 sebesar 8,14% (Maret) dan sampai dengan tahun 2018 di bulan September cenderung menurun menjadi 6,55%, sedangkan tingkat kemiskinan nasional tahun 2013 sebesar 11,36% (Maret), dan mengalami penurunan sampai dengan sebesar 9,66% di September 2018.

Tabel 2.7
Persentase Tingkat Kemiskinan menurut Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2016-2020 (Maret)

NO	KAB/KOTA PROVINSI/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Kep. Mentawai	15.12	14.67	14.44	14.43	14,35
2	Kab. Pesisir Selatan	7.92	7.79	7.59	7.88	7,61
3	Kab. Solok	9.32	9.06	8.88	7.98	7,81
4	Kab. Sijunjung	7.60	7.35	7.11	7.04	6,78
5	Kab. Tanah Datar	5.68	5.56	5.32	4.66	4,40
6	Kab. Padang Pariaman	8.91	8.46	8.04	7.10	6,95
7	Kab. Agam	7.83	7.59	6.76	6.75	6,75
8	Kab. Lima Puluh Kota	7.59	7.15	6.99	6.97	6,86
9	Kab. Pasaman	7.65	7.41	7.31	7.21	7,16
10	Kab. Solok Selatan	7.35	7.21	7.07	7.33	7,15
11	Kab. Dharmasraya	7.16	6.68	6.42	6.29	6,23
12	Kab. Pasaman Barat	7.40	7.26	7.34	7.14	7,04
13	Kota Padang	4.68	4.74	4.70	4.48	4,40
14	Kota Solok	3.86	3.66	3.30	3.24	2,77
15	Kota Sawahlunto	2.21	2.01	2.39	2.17	2,16
16	Kota Padang Panjang	6.75	6.17	5.88	5.60	5,24
17	Kota Bukittinggi	5.48	5.35	4.92	4.60	4,54
18	Kota Payakumbuh	6.46	5.88	5.77	5.68	5,65
19	Kota Pariaman	5.23	5.20	5.03	4.76	4,10
	Sumatera Barat	7.09	6.87	6.65	6.42	6,28
	NASIONAL	13,96	13,47	13,10	9,22	10,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan merupakan dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, tetapi juga mengurangi keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) memberikan gambaran seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan. Penurunan pada P1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengilustrasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

TAHUN	KOTA	DESA	KOTA+DESA
P1			
Maret 2016	0,752	1,334	1,096
September 2016	1,038	1,180	1,122
Maret 2017	0,752	1,175	1,000
September 2017	0,599	1,275	0,990
Maret 2018	0,663	1,329	1,035
September 2018	0,884	1,025	0,959
Maret 2019	0,771	1,093	0,942
September 2019	0,538	0,993	0,779
Maret 2020	0,742	1,068	0,915
September 2020	0,803	1,171	0,992
P2			
Maret 2016	0,153	0,304	0,242
September 2016	0,249	0,299	0,278
Maret 2017	0,157	0,278	0,228
September 2017	0,107	0,324	0,233
Maret 2018	0,142	0,320	0,242
September 2018	0,212	0,214	0,213
Maret 2019	0,196	0,225	0,211
September 2019	0,096	0,191	0,147
Maret 2020	0,164	0,223	0,201
September 2020	0,242	0,278	0,261

Sumber Data: Berita Release BPS

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada periode Maret 2019 – September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga cenderung mengalami kenaikan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi daripada di daerah perkotaan. Pada September 2020, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 0,803 sementara di daerah perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,171.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukan bahwa penduduk miskin di perdesaan memiliki rata-rata pengeluaran dengan garis kemiskinan yang lebih besar dibandingkan penduduk miskin perkotaan. Kondisi penduduk miskin di perkotaan sedikit lebih baik, dilihat dari nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang lebih kecil dibanding penduduk perdesaan. Artinya, diperlukan usaha yang lebih besar untuk mengentaskan penduduk perdesaan dari kemiskinan daripada di perkotaan.

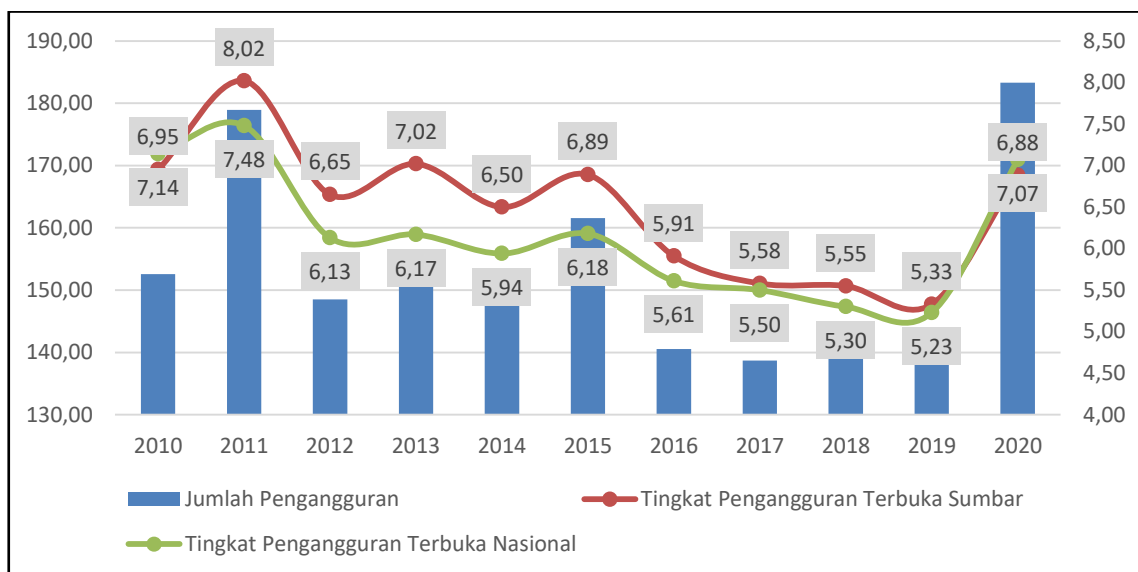
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Di perdesaan, nilai indeks ini masih lebih tinggi di banding di perkotaan. Pada September 2020, nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan sebesar 0,278 dibandingkan perkotaan 0,242 di periode yang sama.

2.1.3 Angka Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha di Provinsi Sumatera Barat telah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Idealnya pertumbuhan lapangan kerja baru dapat lebih tinggi dari pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran akan berkurang setiap tahunnya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Barat cenderung menurun dari tahun 2011 pada angka 8,02% turun hingga 5,33% pada tahun 2019 yang lalu. Walaupun angka ini berada di atas rata-rata secara nasional, namun data tahun 2020 menunjukkan bahwa efek pandemi COVID-19 terhadap TPT di Provinsi Sumatera Barat relatif tidak separah kondisi secara nasional. Angka TPT Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 lebih rendah 6,88% dari angka nasional 7,07%.

Angka pengangguran merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan kemandirian di Provinsi Sumatera Barat. Pengangguran yang terjadi disebabkan oleh angkatan kerja yang pada umumnya tenaga kerja non formal, kurang terdidik dan minat generasi muda bekerja di bidang pertanian yang menjadi sektor ekonomi dominan masih rendah, oleh karena itu dibutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi.

Grafik 2.6
Perbandingan Perkembangan Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010-2020



Sumber : BPS (2020)

Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 138.221.938 jiwa, dengan 128.454.184 jiwa diantaranya berstatus bekerja sedangkan sisanya berstatus pengangguran terbuka. Jumlah pengangguran di Sumatera Barat pada tahun 2020 sebanyak 190.609 jiwa. Ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan kondisi yang kurang baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut diindikasikan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 (kondisi bulan Agustus) TPT Indonesia mencapai 7,07 persen sedangkan pada bulan Agustus tahun 2019 mencapai 5,28 persen. Di Sumatera Barat, TPT terus meningkat dari 5,33 persen pada Februari 2019 menjadi 6,88 persen Agustus 2020.

Tahun 2020 penduduk usia kerja di Sumatera Barat mencapai 4,02 juta orang. Dari penduduk usia kerja tersebut, 2,77 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari bekerja 2,58 juta orang dan pengangguran 190,61 ribu orang. Jumlah bukan angkatan kerja mencapai 1,24 juta orang terdiri dari penduduk yang bersekolah 375,78 ribu orang, mengurus rumahtangga 698,50 ribu orang dan lainnya sebanyak 170,37 ribu orang. Jumlah angkatan kerja di tahun 2020 masih didominasi oleh laki-laki, yang mencapai 1,63 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjanya (TPAK) sebesar 82,08 persen dan angkatan kerja perempuan sebesar 1,14 juta orang (dengan TPAK 56,24 persen). Sebaliknya jumlah bukan angkatan kerja lebih didominasi oleh perempuan yang tercatat sebanyak 888,72 ribu orang dan laki-laki hanya 355,93 ribu orang. Jumlah pengangguran terbuka Agustus 2020 mencapai 190,61 ribu orang (dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,88 persen). TPT laki-laki tercatat sebesar 6,79 persen, dan Tahun 2020 penduduk usia kerja di Sumatera Barat mencapai 4,02 juta orang. Dari penduduk usia kerja tersebut, 2,77 juta orang diantaranya merupakan angkatan kerja, yang terdiri dari bekerja 2,58 juta orang dan pengangguran 190,61 ribu orang. Jumlah bukan angkatan kerja mencapai 1,24 juta orang terdiri dari penduduk yang bersekolah 375,78 ribu orang, mengurus rumahtangga 698,50 ribu orang dan lainnya sebanyak 170,37 ribu orang. Jumlah angkatan kerja di tahun 2020 masih didominasi oleh laki-laki, yang mencapai 1,63 juta orang dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerjanya (TPAK) sebesar 82,08 persen dan angkatan kerja perempuan sebesar 1,14 juta orang (dengan TPAK 56,24 persen). Sebaliknya jumlah bukan angkatan kerja lebih didominasi oleh perempuan yang tercatat sebanyak 888,72 ribu orang dan laki-laki hanya 355,93 ribu orang. Jumlah pengangguran terbuka Agustus 2020 mencapai 190,61 ribu orang (dengan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,88 persen). TPT laki-laki tercatat sebesar 6,79 persen, dan TPT perempuan sebesar 6,99 persen.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Secara tahunan, ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menahan aktivitas ekonomi secara umum. Ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2020 tercatat menurun sebesar -1,60% (yoy), dibandingkan dengan tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Pencapaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nasional namun lebih rendah dibandingkan dengan Sumatera yang masing-masing terkontraksi sebesar -2,07% (yoy) dan -1,19% (yoy). Dari sisi pengeluaran, penurunan ekonomi Sumatera Barat tahun 2020 didorong oleh penurunan mayoritas komponen pengeluaran terutama konsumsi RT dan PMTB yang kontraksi masing-masing sebesar -2,47% (yoy) dan -2,62% (yoy). Perlambatan konsumsi RT di pengaruhi oleh menurunnya pendapatan masyarakat. Pembatasan aktivitas yang dilakukan pada medio April 2020 memberikan dampak pada permintaan yang berujung pada penurunan pendapatan masyarakat. Investasi terkontraksi dipengaruhi oleh perlambatan permintaan yang menahan penjualan swasta sehingga mereka lebih cenderung wait and see.

Disisi lain kontraksi ekspor luar negeri tercatat mereda pada tahun 2020 sebesar -3,31% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar -7,52% (yoy). Kontraksi ekspor yang mereda didorong oleh peningkatan ekspor CPO terutama pada akhir tahun 2020. Dari sisi LU, kontraksi ekonomi tahun 2020 didorong oleh penurunan kinerja mayoritas LU terutama pada LU pertanian, kehutanan dan perikanan, LU transportasi dan pergudangan dan LU perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Aktivitas masyarakat yang cenderung menurun di tahun 2020 mendorong rendahnya permintaan produk pertanian

Sumatera Barat. Aktivitas MICE dan kunjungan wisnus serta wisman yang menurun pada tahun 2020 mendorong penurunan kinerja LU transportasi dan LU perdagangan. Di sisi lain, beberapa lapangan usaha meningkat terutama yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 yaitu LU informasi dan komunikasi dan LU jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Peningkatan pemasangan dan penggunaan internet terutama bagi masyarakat yang bekerja atau belajar dari rumah saat kebijakan PSBB diterapkan mendorong kinerja LU informasi dan komunikasi sedangkan LU jasa kesehatan meningkat sehubungan dengan penanganan COVID-19 yang dilakukan selama pandemi.

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persen)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,01	3,40	3,54	2,63	1,19
2. Pertambangan dan Penggalian	2,00	1,13	5,79	6,22	-1,31
3. Industri Pengolahan	4,90	2,26	-0,57	-1,95	-0,54
4. Pengadaan Listrik & Gas	10,94	4,06	4,09	4,20	-6,81
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,40	3,96	2,24	6,10	-1,28
6. Konstruksi	6,59	7,23	7,04	8,42	-2,92
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,41	6,50	7,03	7,33	-1,14
8. Transportasi dan Pergudangan	7,67	7,17	6,47	4,74	-16,10
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,62	8,76	8,23	8,11	-15,95
10. Informasi dan Komunikasi	9,40	8,74	8,57	8,75	9,76
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,03	2,11	0,99	2,29	1,34
12. Real Estate	5,37	4,49	4,67	6,78	0,22
13. Jasa Perusahaan	4,94	5,19	5,45	6,20	-3,98
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,96	4,49	5,97	7,09	-0,69
15. Jasa Pendidikan	7,85	9,94	7,19	7,94	5,03
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,47	8,58	7,28	7,54	8,83
17. Jasa Lainnya	9,35	7,95	7,86	7,50	-10,10
PDRB SUMATERA BARAT	5,27	5,29	5,16	5,05	-1,60

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dengan provinsi se Sumatera dan nasional pada tahun 2020, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami kontraksi dan berada di posisi ke tujuh namun berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional, seperti terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.10
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi se Sumatera Tahun 2016-2020 (%)

PROVINSI/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aceh	3,29	4,18	4,61	4,14	-0,37

PROVINSI/NASIONAL	2016	2017	2018	2019	2020
2. Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22	-1,07
3. Sumatera Barat	5,27	5,30	5,14	5,01	-1,60
4. Riau	2,18	2,66	2,35	2,81	-1,12
5. Jambi	4,37	4,60	4,69	4,37	-0,46
6. Sumatera Selatan	5,04	5,51	6,01	5,69	-0,11
7. Bengkulu	5,28	4,98	4,97	4,94	-0,02
8. Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67
9. Kep.Bangka Belitung	4,10	4,47	4,45	3,32	-2,30
10. Kep.Riau	4,98	1,98	4,47	4,84	-3,80
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : SBDA Tahun 2021

Sementara untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku secara regional dari sepuluh provinsi di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi ke tujuh di atas Lampung, Bengkulu dan Aceh. Provinsi yang memiliki sumber minyak, gas, mineral dan pertambangan memiliki PDRB yang tinggi yang secara langsung berpengaruh terhadap PDRB per kapita seperti Kepulauan Riau, Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, yang terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.11
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi se Sumatera
Tahun 2016-2020 (Rp. Juta)

PROVINSI	2016	2017	2018	2019	2020
1. Aceh	26,85	28,10	29,52	30,56	30,47
2. Sumatera Utara	44,39	48,00	51,42	54,90	55,17
3. Sumatera Barat	37,29	40,19	42,80	45,20	44,03
4. Riau	104,86	105,84	110,38	109,09	102,29
5. Jambi	49,49	53,99	58,22	59,88	56,24
6. Sumatera Selatan	43,36	46,31	50,10	53,55	53,50
7. Bengkulu	29,07	31,35	33,82	36,20	36,30
8. Lampung	34,05	36,99	39,71	42,22	41,61
9. Kep.Bangka Belitung	46,40	48,82	50,08	50,91	49,77
10. Kep.Riau	106,50	109,33	116,46	122,23	113,39

Sumber : SBDA Tahun 2021

Struktur perekonomian Sumatera Barat menurut lapangan usaha tahun 2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 22,38%, Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 15,76%, serta transportasi dan pergudangan 10,44%.

Tabel 2.12
Struktur Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan & Perikanan	24,06	23,61	23,17	22,15	22,38
2. Pertambangan dan Penggalian	4,53	4,27	4,27	4,30	4,27
3. Industri Pengolahan	10,09	9,74	9,10	8,38	8,64
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,10	0,11	0,11	0,11	0,10
5. Pengadaan Air	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
6. Konstruksi	9,38	9,29	9,63	10,09	10,19
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,61	14,76	15,30	15,78	15,76
8. Transportasi dan Pergudangan	12,23	12,46	12,65	12,60	10,44
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,22	1,29	1,37	1,43	1,24
10. Informasi dan Komunikasi	4,85	4,99	5,46	5,81	6,44
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,10	3,17	3,01	2,91	3,04
12. Real Estate	2,00	2,01	1,96	2,01	2,06
13. Jasa Perusahaan	0,43	0,43	0,44	0,44	0,44
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,70	5,82	5,92	6,13	6,71
15. Jasa Pendidikan	3,67	3,84	4,20	4,35	4,30
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,26	1,28	1,39	1,42	1,62
17. Jasa Lainnya	1,68	1,77	1,93	2,00	1,88
PDRB SUMATERA BARAT	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2021

Dari sisi pengeluaran, stimulus fiskal pemerintah baik berupa konsumsi maupun investasi pemerintah menjadi penopang bagi pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan tahun 2019, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan yaitu -2,47% dan -8,50% pada tahun 2020, begitu pula halnya dengan pengeluaran konsumsi lembaga non profit mengalami penurunan menjadi -4,39 % pada tahun 2020.

Dilihat dari pola distribusi penggunaan tahun 2020, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar dalam PDRB Provinsi Sumatera Barat sebesar 54,06%, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 54,40%.

Penyumbang kedua adalah pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 30,00% dan Pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 11,92%. Laju pertumbuhan dan struktur ekonomi menurut penggunaan selengkapannya dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.13
Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Ekonomi
Menurut Penggunaan di Sumatera Barat, Tahun 2018-2020

KOMPONEN PENGGUNAAN	PERTUMBUHAN EKONOMI			STRUKTUR EKONOMI		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,62	4,74	-2,47	53,23	54,40	54,06
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit	6,54	11,85	-4,39	1,06	1,14	1,12

KOMPONEN PENGGUNAAN	PERTUMBUHAN EKONOMI			STRUKTUR EKONOMI		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,40	5,13	-8,50	12,59	12,64	11,92
Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,52	5,16	-2,62	29,82	30,10	30,00
Perubahan Inventori	-	-	-	0,11	0,04	0,15
Net Ekspor Barang dan Jasa	16,56	5,99	17,57	3,19	1,67	2,67
PDRB SUMATERA BARAT	5,16	5,05		100	100	100

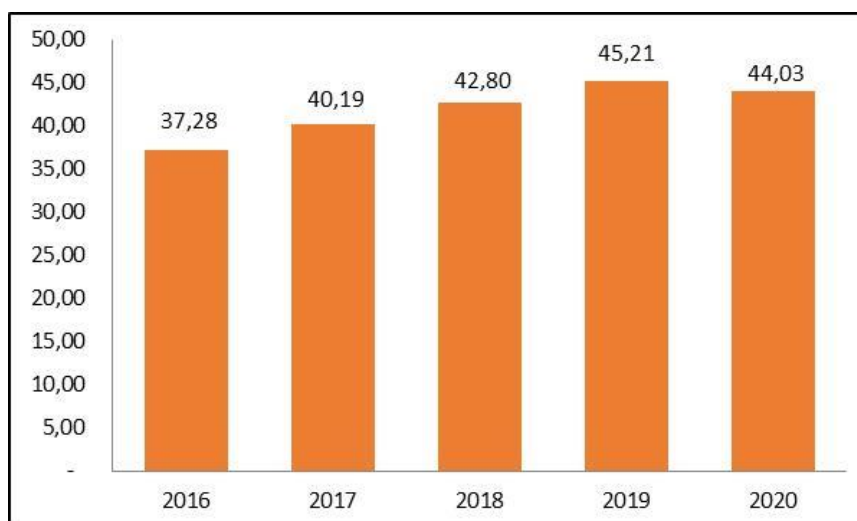
Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat Tahun 2021

2.1.5 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Berdasarkan grafik 2.4, Nilai PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan, namun pada 2020 menurun akibat perekonomian yang tidak stabil dimasa pandemi covid-19. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 37,28 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 45,21 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan inflasi yang cenderung naik. Sementara pada tahun 2020 terjadi penurunan 1,18 juta rupiah menjadi 44,03 juta rupiah karena inflasi yang cenderung turun dibandingkan 2019. Hal ini menunjukkan menurunnya daya beli sebagian besar masyarakat yang perekonomiannya terdampak akibat pandemi covid-19.

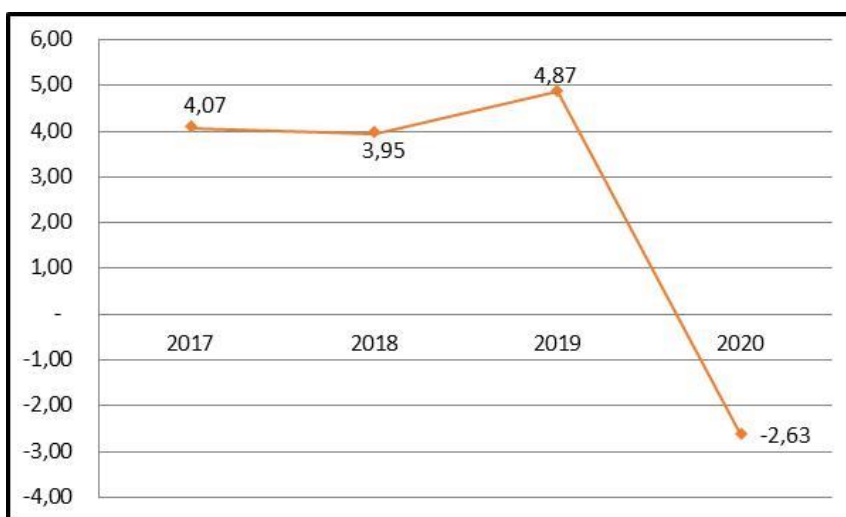
Grafik 2.7
PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Laju pertumbuhan PDRB per kapita dapat dilihat dari angka PDRB per kapita berdasarkan harga konstan 2010. Dari grafik 2.5 dapat terlihat selama periode 2017-2020, PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2010 senantiasa mengalami peningkatan meskipun cenderung melambat, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi karena pandemi.

Grafik 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020 (persen)

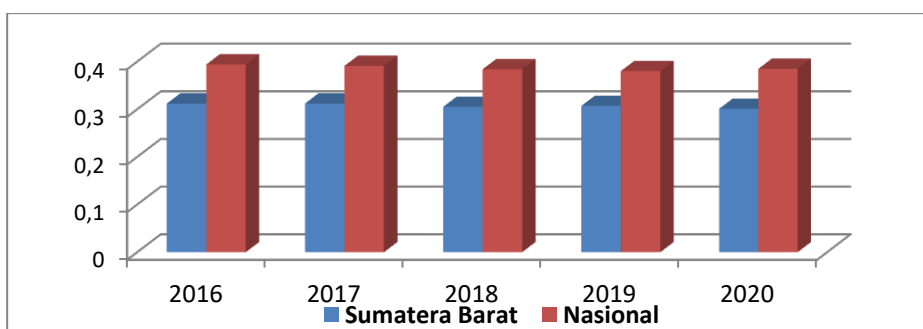


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini Ratio atau Koefisien Gini. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Indeks Gini Ratio di Sumatera Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan distribusi pendapatan yang relatif merata, seperti terlihat pada Grafik 2.6.

Grafik 2.9
Gini Ratio Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

Ketimpangan wilayah diukur berdasarkan Indeks Williamson yang dikelompokkan ke dalam kategori wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah dengan nilai indeks williamson $<0,3$, tingkat ketimpangan sedang dengan nilai indeks williamson antara $0,3 - 0,7$, dan tingkat ketimpangan tinggi dengan indeks williamson $>0,7$. Sumatera Barat berada pada tingkat ketimpangan sedang dengan indeks selama lima tahun terakhir berada pada kisaran $0,45 - 0,35$ yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya atau ketimpangannya semakin berkurang. Sampai dengan tahun 2015 Sumatera Barat masih memiliki tiga daerah kabupaten tertinggal yakni Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat yang perlu mendapat prioritas penanganannya untuk bisa lepas dari ketertinggalan.

BAB III

KINERJA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

Bab ini menyajikan Gambaran Umum Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang mencakup dasar pembentukan organisasi, struktur organisasi beserta fungsinya, ketersediaan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana yang mendukung kinerja Bappeda, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan serta Capaian Kinerja Tahun 2020.

3.1 Gambaran Organisasi

3.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bappeda Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah dijelaskan bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat terdiri atas susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program; dan
 3. Sub bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Makro;
 2. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
 3. Sub Bidang Sistem Inovasi Perencanaan.
- d. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 2. Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan
 3. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
- e. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota; dan
 3. Sub Bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan.

- f. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur wilayah; dan
 - 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

3.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Bappeda Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana tugas pokoknya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dengan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. penyediaan database perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- f. pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan pendanaan pembangunan serta pengendalian, evaluasi dan data informasi perencanaan pembangunan daerah;
- g. penyelenggaraan fasilitasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta kelompok jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan, dengan fungsi sebagai berikut :

- 1. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan;
- 2. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan; dan
- 3. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

b. Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan

Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan makro, pendanaan pembangunan dan sistem inovasi perencanaan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan makro;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendanaan pembangunan; dan
3. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi.

c. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Trantibbum Linmas, Pengawasan, Kesekretariatan DPRD, Kesekretariatan Daerah, Badan Penghubung Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan pengembangan, Komunikasi, Persandian, statistik, Fungsi penunjang dan Fungsi Lainnya, serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia;
2. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan aparatur; dan
3. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.

d. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta data informasi informasi perencanaan pembangunan, dengan fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN;
2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota; dan
3. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan.

e. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, kebencanaan, Pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah, dengan fungsi sebagai berikut :

1. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
2. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur wilayah; dan
3. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Sumber Daya Air, tata ruang dan lingkungan hidup.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Jabatan Fungsional Perencana yang bertugas menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :

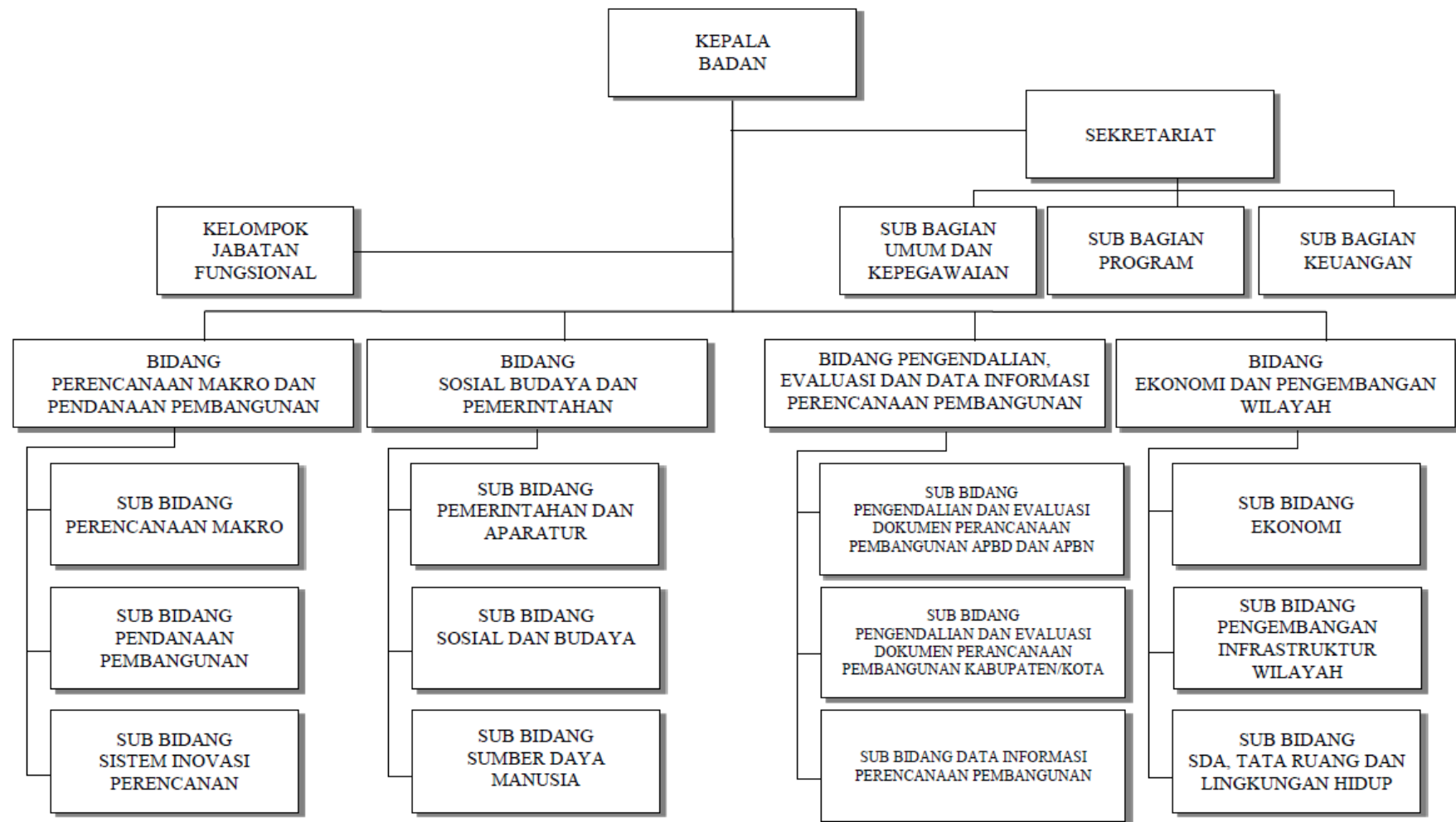
1. Perencanaan secara menyeluruh meliputi identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaan.
2. Pengembangan profesi perencanaan meliputi pembuatan karya ilmiah di bidang perencanaan, penerjemahan/penyaduran buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman modul di bidang perencanaan, studi banding di bidang perencanaan dan pengembangan di bidang perencanaan.
3. Melakukan aktivitas penunjang perencanaan dalam bentuk mengajar, melatih, melakukan bimbingan di bidang perencanaan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan dan menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana

3.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dengan komposisi jabatan struktural yang terdiri atas :

- a. Jabatan Kepala Badan, Eselon II a
- b. 1 Jabatan Sekretaris dan 4 Jabatan Kepala Bidang, Eselon III a
- c. 4 Jabatan Fungsional Perencana
- d. 15 Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Eselon IV a

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

3.1.4 Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, sinergis dan kredibel perlu didukung oleh sumber daya manusia yang handal. Pada tahun 2020, Bappeda Provinsi Sumatera Barat memiliki pegawai sebanyak 89 orang yang terdiri atas 19 orang struktural, 62 orang fungsional umum dan 4 orang Fungsional Tertentu, sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II	1	-	1
2.	Eselon III	2	2	4
3.	Eselon IV	8	6	14
4.	Fungsional Tertentu	1	3	4
5.	Fungsional Umum	36	26	62
6.	PTT	1	-	1
	Jumlah	49	37	86

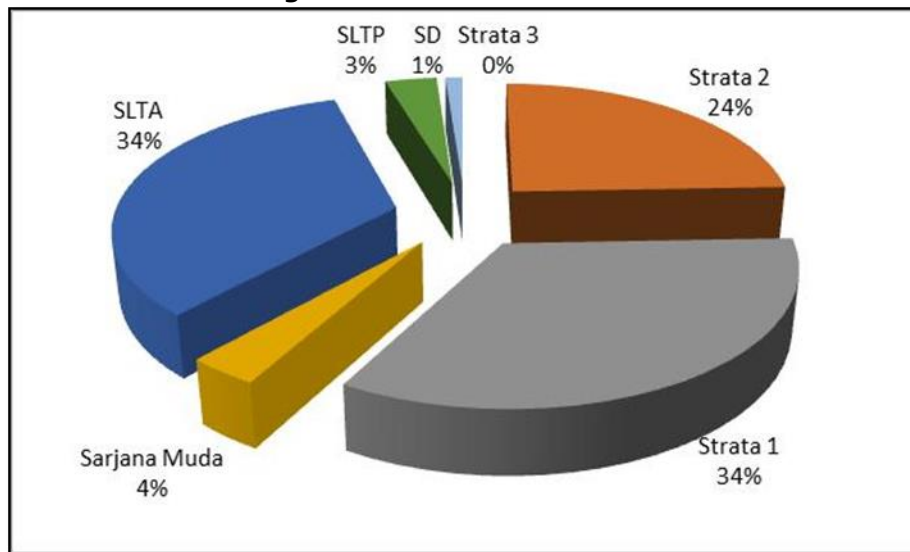
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan pegawai untuk jabatan fungsional tertentu dibandingkan fungsional umum, dimana jabatan Fungsional Umum berjumlah 62 orang dan Fungsional Tertentu berjumlah 4 orang. Sebagaimana diketahui, sebagian besar tugas dan fungsi Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan mengharuskan sebagian besar dari pegawainya adalah berstatus Fungsional Tertentu yaitu Fungsional Perencana.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	-	-	-
2.	Strata 2	7	14	21
3.	Strata 1	15	14	29
4.	Sarjana Muda	1	2	3
5.	SLTA	21	8	29
6.	SLTP	3	-	3
7.	SD	1	-	1
	Jumlah	48	38	86

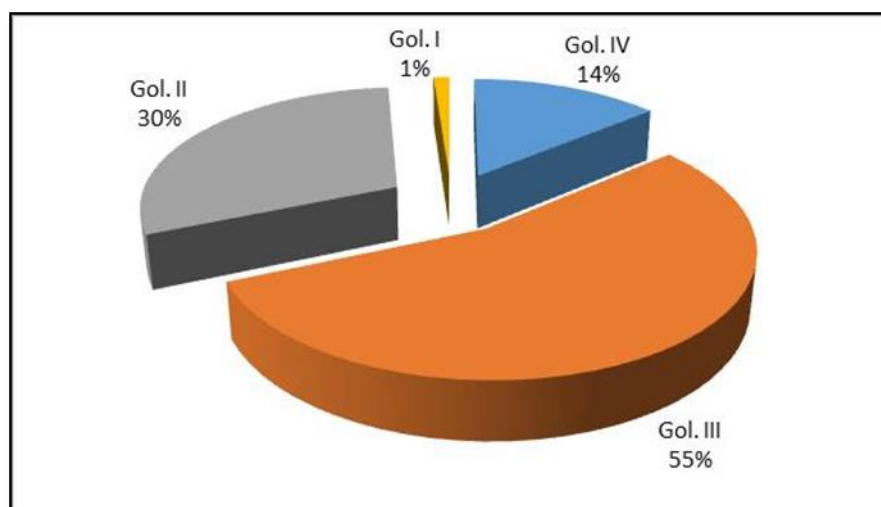
Grafik 3.1
Persentase Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat, pada tahun 2020 kekuatan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan sebesar 24% berpendidikan S2 atau sebanyak 21 orang, 34% berpendidikan S1 atau sebanyak 29 orang, 4% berpendidikan D3 atau sebanyak 3 orang, berpendidikan SLTA sebesar 34% atau sebanyak 29 orang, berpendidikan SLTP sebesar 3% atau sebanyak 3 orang dan berpendidikan SD sebesar 1% atau sebanyak 1 orang.

Sementara itu, kekuatan pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan golongan secara berurutan persentasenya adalah Gol. IV sebesar 14% atau sebanyak 12 orang, Gol. III sebesar 55% atau sebanyak 47 orang dan Gol. II sebesar 30% atau sebanyak 26 orang dan Gol. I sebesar 1% atau sebanyak 1 orang. Ini menunjukkan bahwa pegawai Bappeda Provinsi Sumatera Barat didominasi oleh pegawai Gol. III. Potret kekuatan pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.2
Persentase Pegawai Berdasarkan Golongan



3.1.5 Dukungan Sarana dan Prasarana

Secara umum, kebutuhan sarana dan prasarana di Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah tercukupi dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada. Berdasarkan Laporan Barang Milik Daerah pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 2020, dapat digambarkan kondisi rekapitulasi buku inventaris aset sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Buku Inventaris Tahun 2020

Kelompok	Jenis	Objek	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang		Nilai Perolehan (Rp.)	Akumulasi Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)
				Persil	Jumlah			
1.3			Aset Tetap			44.626.291.926,00	19.165.733.010,73	25.460.558.915,27
	1.3.1		Tanah			5.600.590.000,00	-	5.600.590.000,00
		01	Tanah	1	4.852	5.600.590.000,00	-	5.600.590.000,00
	1.3.2		Peralatan dan Mesin			16.944.624.121,00	15.253.362.796,00	1.691.261.325,00
		02	Alat-alat Besar		12	302.874.500,00	263.994.500,00	38.880.000,00
		03	Alat-alat Angkutan		129	3.324.993.556,00	2.733.128.556,00	591.865.000,00
		04	Alat Bengkel dan Alat Ukur		38	390.729.350,00	374.292.120,00	16.437.230,00
		05	Alat Pertanian		2	15.148.000,00	15.148.000,00	-
		06	Alat Kantor dan Rumah Tangga		1.469	12.249.633.035,00	11.266.935.384,00	982.697.651,00
		07	Alat Studio dan Alat Komunikasi		127	620.295.680,00	567.914.236,00	52.381.444,00
		08	Alat-alat Kedokteran		2	39.000.000,00	30.000.000,00	9.000.000,00
		09	Alat Laboratorium		1	1.950.000,00	1.950.000,00	-
	1.3.3		Gedung dan Bangunan			22.036.151.435,00	3.912.370.214,73	18.123.781.220,27
		11	Bangunan Gedung	1	3.500	22.036.151.435,00	3.912.370.214,73	18.123.781.220,27
	1.3.4		Aset Tetap Lainnya			44.926.370,00	-	44.926.370,00
		12	Buku Perpustakaan	-	401	44.926.370,00	-	44.926.370,00
1.5			Aset Lainnya			1.749.083.432,00	1.738.323.432,00	10.760.000,00
	1.5.3		Aset Tidak Berwujud			1.749.083.432,00	1.738.323.432,00	10.760.000,00
		01	Aset Tidak Berwujud	-	21	1.749.083.432,00	1.738.323.432,00	10.760.000,00
Total Harga						46.375.375.358,00	20.904.056.442,73	25.471.318.915,27
Dibulatkan						46.375.375.358,00	20.904.056.443,00	25.471.318.915,00

Sumber : Laporan Barang Milik Daerah Tahun 2020

3.2 Tujuan dan Sasaran

3.2.1 Tujuan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat di bidang perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan juga kedalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, maka tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah :

1. Terwujudnya efektifitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Terwujudnya pembinaan, fasilitasi dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas (KISS) dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah
3. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi dalam perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang telah dirumuskan didalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, yaitu :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas SDM perencana.
2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
3. Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, serta konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
4. Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
5. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.

Dengan demikian rumusan tujuan Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu : 1) Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan 2) Meningkatnya Kinerja Organisasi akan dapat tercapai. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas lebih lanjut akan dijabarkan kedalam bentuk perencanaan teknis/mikro oleh masing-masing bidang dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama tahun 2020.

3.2.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020 adalah :

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya pembinaan, fasilitasi dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas dalam penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah.
3. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

4. Penggunaan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.
5. Meningkatnya pengelolaan organisasi

Sasaran tersebut dirumuskan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang selanjutnya ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Penyalenggaraan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2020 dan telah dilakukan perubahan pada tanggal 16 November 2020 sehubungan adanya perubahan anggaran akibat pandemi COVID-19. Adapun sasaran strategis yang telah dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja dimaksud terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan :	100%
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra	
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja	
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD	
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

Sumber : Perubahan PK Tahun 2020

3.3 Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 didasarkan kepada upaya pencapaian sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Penyusunan program dan kegiatan ini tidak terlepas dari pencapaian visi misi Gubernur yang tertuang pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Pada Tahun 2020, Bappeda Provinsi Sumatera Barat merencanakan 8 program dan 65 kegiatan dengan pagu sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. Rp. 11.175.635.881,-. Fokus Program dan kegiatan serta alokasi anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Rencana Program dan Kegiatan pada APBD Tahun 2020

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET OUTPUT KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
	BELANJA LANGSUNG		11.175.635.881
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	3.027.134.125
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Benda Pos materai 6000 dan 3000, pengiriman surat dan Honor Pegawai PTT	39.980.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	919.000.000
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya jaminan asuransi kendaraan operasional kantor	69.295.000
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik, kawat, faksimili, internet serta lisensi zoom meeting	902.370.000
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	48.681.583
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pencetakan dan penggandaan	35.951.284
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik untuk penerangan kantor	5.930.545
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya bahan bacaan, surat kabar, majalah dan buku-buku	32.040.000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rapat/pertemuan yang diselenggarakan	50.000.000
10	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti	820.140.753
11	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	terlaksananya wirid - terlaksananya kegiatan senam	103.744.960
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	636.951.314
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	112.563.750
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	180.000.000

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET OUTPUT KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan kendaraan operasional	83.102.364
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor	Telaksananya pemeliharaan AC, Tabung Pemadam kebakaran dan mesin pompa air beserta suku cadang	32.500.000
16	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor yang di perbaiki	19.885.200
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Perbaikan Sound System, Telepon, Faximile, CCTV dan jaringan, Kamera dan Projector	13.000.000
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya pemeliharaan rutin komputer, laptop, printer, scan dan Jaringan Komputer	30.000.000
19	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya komputer, laptop dan printer	165.900.000
III	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	67.500.000
20	Pengadaan Pakaian Sipil Harian (PSH)	Meningkatnya kerapian dan disiplin pegawai dalam berpakaian dinas	67.500.000
IV	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat	1.220.000
21	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	ASN yang mengikuti Bimtek	1.220.000
V	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	401.063.083
22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD, Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (LAKIP, LPPD dan LKPJ Bappeda)	65.444.050
23	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersedianya honorarium PA; KPA; PPK; PPTK; dan pengelola keuangan lainnya	254.000.000
24	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya Renja, DPA dan DPPA	38.659.033
25	Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Tersedianya kebutuhan pengelolaan barang milik daerah di SKPD	42.960.000
VI	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPDP Provinsi. - Persentase kesesuaian prioritas pembangunan pada RKPDP kabupaten/kota dengan RKPDP Provinsi.	1.278.368.923
26	Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya hasil Musrenbang RKPDP Tahun 2020	19.926.600
27	Penyusunan KUA/PPAS APBD	Tersusunnya KUA PPAS APBD Tahun 2021 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2020	209.096.600
28	Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	571.325.274

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET OUTPUT KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
42	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah buku hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019	77.744.830
43	Pemantauan dan Pelaporan Manajerial Aplikasi PP 39/2006	Jumlah laporan hasil pemantauan melalui aplikasi e-Monev Bappenas	14.298.400
44	Harmonisasi Perencanaan dan Kerja Sama Pembangunan Bidang Ekonomi	Dokumen perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang ekonomi yang harmonis dan sinkron	170.646.701
45	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Jumlah rapat evaluasi dokumen perencanaan	126.562.528
46	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	Dokumen Perencanaan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan yang sinkron	25.801.721
47	Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	Dokumen Perencanaan Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha yang sinkron	14.629.450
48	Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Perencanaan pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	128.535.600
49	Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Laporan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi OPD untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	15.350.956
50	Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen Perencanaan Pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di Provinsi Sumatera Barat yang sinkron - Tersusunnya Ranperda Pembangunan infrastruktur Berkelanjutan	142.712.450
51	Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Perencanaan pembangunan sanitasi permukiman Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dengan pelaksanaan	41.183.200
52	Akselerasi dan sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	Dukungan perkuatan kelembagaan sumber daya air (Komisi Irigasi, Dewan Sumber Air, TKPSDA, dll)	13.334.400
53	Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	- Rancangan RKPD lingkup Bidang Pembangunan social Budaya dan Pemerintahan ; - Hasil Verifikasi Pemetaan Program; Verifikasi Rancangan Renja Awal SKPD 2021; - Rancangan Akhir Renja SKPD 2021; - Rancangan Renja Perubahan SKPD 2020; - Rapat Koordinasi Terkait Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	512.508.200
54	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya	Sasaran Pembangunan Sub Bidang social Budaya yang tercapai	54.635.950
55	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintah dan Aparatur	Sasaran pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur yang tercapai	54.090.368
56	Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumberdaya manusia yang tercapai	40.556.500
57	Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	Pelaksanaan rakor AMPL Kab/ kota pelaksana SABRT yang terfasilitasi; kab pelaksana pamsimas yang terfasilitasi	45.772.000

No.	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET OUTPUT KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
58	Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	Terlaksananya Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan dan tersusunnya laporan koordinasi	51.013.926
59	Harmonisasi Program / Kegiatan Pangan dan Gizi	Terlaksananya pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pangan dan gizi	43.631.451
60	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kab/Kota	- Jumlah Renja yang dievaluasi - Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten/Kota yang difasilitasi . - Jumlah RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota yang dievaluasi.	341.428.756
61	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Sumatera barat	GAP/GBS OPD Provinsi yang diverifikasi ; Rakor Pelaksanaan RAD PUG	232.188.294
62	Pelaksanaan rakortek Pembangunan Daerah	Mengikuti Rakortek Tingkat Pusat	76.206.805
63	Peningkatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	Meningkatnya kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/Kota	1.944.261
64	Revisi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025	Revisi Perda RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, 1 dokumen	172.943.257
65	Tata Kelola Pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah	Perencanaan dan implementasi program PHJD yang terkoordinasi	363.048.900

Disamping dukungan anggaran melalui APBD Tahun 2020 sebagaimana tergambar pada tabel diatas, Bappeda Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan anggaran Dekonsentrasi berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 8 Tahun 2019 Tanggal 16 Otober 2019 Tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 385.727.000,- yang tertuang dalam DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2020/2020 tanggal 30 April 2020. Fokus Program dan kegiatan serta alokasi anggaran dekonsentrasi pada tahun 2020 tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Rencana Program dan Kegiatan Dekonsetrasi Tahun 2020

No.	Uraian	Target Output Kegiatan	Anggaran (Rp.)
01.06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional		385.727.000
5246	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang		
A.	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Sasaran Program Pembangunan Nasional		66.618.000
1	Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Asistensi dalam melaksanakan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dalam menyusun dokumen perencanaan	51.938.000

No.	Uraian	Target Output Kegiatan	Anggaran (Rp.)
2	Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024	Terlaksananya Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024 dalam menyusun dokumen perencanaan daerah	6.840.000
3	Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional	Terlaksananya bimtek dan asistensi penyusunan rencana pembangunan kewilayahan mendukung prioritas Nasional dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative dan spasial	7.840.000
B	Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)		206.260.000
1	Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	198.420.000
2	Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional	Terlaksananya Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional	7.840.000
C	Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi	Tersedianya dukungan pelaksanaan kegiatan pada Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat	112.849.000

3.4 Pencapaian Target Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat meliputi 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagai alat ukurnya dengan hasil capaian sebagaimana bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Capaian Strategis Terhadap Indikator Kinerja
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan :	%	100	100	100
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra				
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja				
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD				
		- Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS				
2	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	BB (72,51)	100

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian dari indikator Sasaran Strategis 1 (Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan) adalah dengan predikat **amat baik** (100%), dan sasaran strategis 2 (Meningkatkan tata kelola organisasi) dengan predikat **amat baik** (100%). Dengan demikian pencapaian indikator sasaran strategis Bappeda pada tahun 2020 secara rata-rata adalah **amat baik** (100%). Berikut uraian dari capaian target kinerja per sasaran strategis pada tahun 2020 :

1. Sasaran Strategis 1, Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan
Sasaran meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang diukur melalui indikator kinerja persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan dapat dipenuhi dengan realisasi capaian sebesar 100%. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang pertama ini digambarkan melalui 3 (tiga) tolok ukur kinerja yang meliputi :
 - a. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra
Tolok ukur kinerja ini ditentukan melalui kesesuaian sasaran dan indikator sasaran Renstra dengan RPJMD. Dalam hal ini, sasaran dan indikator sasaran pada Renstra

OPD telah mempedomani dan mengacu pada sasaran dan indikator sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dimana penjabarannya telah mempertimbangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Dari 46 (empat puluh enam) sasaran pembangunan dan 106 (seratus enam) Indikator Kinerja dalam dokumen Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 dijabarkan ke dalam Renstra SKPD 2016–2021 yang tersebar di beberapa SKPD dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan tingkat kesesuaian sasaran 100 % dan tingkat kesesuaian indikator sasaran 100 %.

b. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja

Renstra merupakan rencana strategis SKPD yang bersifat jangka menengah sebagai wujud implementasi dari RPJMD. Renstra tersebut dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan yang dikenal dengan Renja. Sasaran dan indikator sasaran yang terdapat pada Renja SKPD haruslah mempedomani dan mengacu pada sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam Renstra masing-masing SKPD. Penjabarannya telah mempertimbangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Berdasarkan hal tersebut, dari 128 (seratus dua puluh delapan) sasaran pembangunan dan 230 (dua ratus tiga puluh) Indikator Kinerja dalam dokumen Renstra SKPD 2016–2021 telah dijabarkan ke dalam Renja SKPD Tahun 2020 menjadi 128 (seratus dua puluh delapan) sasaran dan 230 (dua ratus tiga puluh) indikator kinerja sasaran dengan tingkat kesesuaian sasaran 100 % dan tingkat kesesuaian indikator sasaran 100 %.

c. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD

Sasaran dan indikator sasaran pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai dokumen tahunan secara substansi telah konsisten dan telah mempedomani serta mengacu pada sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, dari 46 (empat puluh enam) sasaran pembangunan dan 106 (seratus enam) Indikator Kinerja dalam dokumen Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016–2021 dijabarkan ke dalam RKPD Tahun 2020 dengan tingkat kesesuaian sasaran 100 % dan tingkat kesesuaian indikator sasaran 100% dimana penjabarannya telah mempertimbangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

d. Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS

Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman KUA-PPAS sebagai dokumen penganggaran. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 177 yang berbunyi Program dan kegiatan dalam KUA PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka semua kegiatan yang terdapat dalam KUA-PPAS harus ada dalam RKPD, artinya sasaran dan indikator yang terdapat dalam KUA-PPAS yang mengacu pada sasaran yang terdapat dalam RKPD. Setelah dilakukan analisa terhadap kedua dokumen tersebut, diketahui bahwa terdapat kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dan KUA PPAS Tahun 2020.

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target kinerja pada sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sesuai target yaitu konsistensi dan kesesuaian antar dokumen perencanaan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 7.041.767.359,- dan terealisasi Rp. 6.847.429.065,- atau 97,24%. Anggaran tersebut tersebar pada 3 program dan 40 kegiatan yaitu :

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 8 kegiatan
- 2) Program Pembangunan Data dan Informasi Pembangunan dengan 3 kegiatan
- 3) Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 29 kegiatan

2. Sasaran Strategis 2, Meningkatkan Tata Kelola Organisasi

Gambaran pencapaian sasaran strategis Meningkatkan tata kelola organisasi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat dilihat berdasarkan realisasi dan capaian indikator kinerja pada perjanjian kinerja sebelumnya yang diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja. Pencapaian target indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2020 tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan adalah BB realisasinya juga BB dengan nilai 72,51. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah berorientasi hasil, akuntabilitas kinerja sudah baik, akuntabel dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal walaupun belum begitu optimal.

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target kinerja pada sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan tata kelola organisasi dengan indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja yang tercapai sebesar 100%, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 4.133.868.522,- dan terealisasi Rp. 4.075.184.164,80,- atau 98,58%. Anggaran tersebut tersebar pada 5 program dan 25 kegiatan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 11 kegiatan.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 8 kegiatan.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 kegiatan.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 1 kegiatan.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan 4 kegiatan.

3.5 Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2020, pada APBD Perubahan 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 19.446.925.651,00 dan terealisasi sebesar Rp 19.128.042.690,80 jumlah tersebut mencapai 98,36 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD
Tahun 2020

Nama	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8.271.289.770,00,-	8.205.429.461,00,-	99,20
Belanja Barang dan Jasa	10.426.010.151,00,-	10.179.026.699,80,-	97,63
Belanja Modal	749.625.730,00,-	743.586.530,00,-	99,19
Jumlah	19.446.925.651,00,-	19.128.042.690,80,-	98,36

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 19.128.042.690,80 atau dalam bentuk persentase sebanyak 98,36 %. Untuk Belanja Pegawai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.271.289.770,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 8.205.429.461,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 99,20%. Untuk Belanja Barang dan Jasa, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 10.426.010.151,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 10.179.026.699,80 atau dalam bentuk persentase sebanyak 97,63%. Untuk Belanja Modal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 749.625.730,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 743.586.530,00 atau dalam bentuk persentase sebanyak 99,19 %.

Dilihat dari pembagian alokasi belanja berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung, besaran alokasi anggaran dan realisasinya tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja APBD
Tahun 2020

Nama	Anggaran	Realisasi	%
Belanja tidak Langsung	8.271.289.770,00,-	8.205.429.461,00,-	99,20
Belanja Langsung	11.175.635.881,00,-	10.922.613.229,80,-	97,74
Jumlah	19.446.925.651,00,-	19.128.042.690,80,-	98,36

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2020

Sementara itu, melalui anggaran dekonsentrasi (APBN) Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapat anggaran sebesar Rp. 958.891.000,- yang diterima dari Kementerian PPN/Bappenas. Namun seiring terjadinya wabah virus covid-19 yang sedang menyerang dunia, Indonesia juga tidak luput dari serangan virus mematikan ini sehingga pemerintah dengan seksama mengambil kebijakan untuk merasionalisasi anggaran kegiatan sebesar 50%. Rasionalisasi ini didasari surat Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 04447/SES/04/2020 tentang Kebijakan Penyesuaian Anggaran Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pencegahan Virus Covid-19, Pagu anggaran yang sebelumnya sebesar Rp. 958.891.000,- dirasionalisasikan menjadi Rp. 385.727.000,-.

Perkembangan serapan anggaran sampai dengan akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 380.599.780,- atau mencapai 98,67% dari total anggaran sebesar Rp. 385.727.000,-. Serapan anggaran berdasarkan masing-masing jenis belanja yang tercantum pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi
Per Jenis Belanja Tahun 2020

Kode	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	18.147.000	18.074.780	99,60
521211	Belanja Bahan	81.846.000	81.236.000	99,25
521213	Belanja Output Kegiatan	6.100.000	6.100.000	100,00
521213	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000	1.900.000	60,32
522151	Belanja Jasa Profesi	53.750.000	52.850.000	98,33
521115	Honor Operasional Satker	64.800.000	64.800.000	100,00
524111	Belanja Perjalanan Biasa	120.050.000	120.050.000	100,00
524111	Belanja Perjalanan Dinas	37.884.000	35.589.000	93,94
Jumlah		385.727.000	380.599.780	98,67

3.6 Pencapaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan Fungsi Penunjang Perencanaan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi APBD pada tahun 2020 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp. 11.175.635.881,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.922.613.229,80,- atau sebesar 97,74% yang didukung oleh 8 Program yang terdiri atas 5 Program Non Urusan dan 3 Program Urusan Fungsi Penunjang Perencanaan. Berikut terinci pagu dana dan realisasi tahun 2020 dimaksud :

1. Program Non Urusan :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran Rp. 3.027.134.125,- dan realisasi sebesar Rp. 2.976.925.768,80 atau 98,34%. Outcome dari program ini adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran, dengan target 100% dan tercapai 100%.

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan anggaran Rp. 636.951.314,- dan realisasi sebesar Rp. 634.512.689,- atau 99,62%. Outcome dari program ini adalah persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur, dengan target 100% dan tercapai 100%.
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan anggaran Rp. 67.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 67.498.200,- atau 100%. Outcome dari program ini adalah persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas dengan target 100% dan tercapai 100%.
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan anggaran Rp. 1.220.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.125.000,- atau 92,21%. Outcome dari program ini adalah rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat dengan target 10JPL/orang/tahun dan tercapai 100%.
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan anggaran Rp. 401.063.083,- dan realisasi sebesar Rp. 395.122.507,- atau 98,52%. Outcome dari program ini adalah tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD dengan target 100% dan tercapai 100%.
2. Program Urusan Fungsi Penunjang Perencanaan :
- a. Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan, dengan anggaran Rp. 210.624.628,- dan realisasi sebesar Rp. 205.560.003,- atau 97,60%. Outcome dari program ini adalah :
 - Persentase kelengkapan data pendukung untuk pengukuran kinerja sasaran pembangunan yang tercapai pada RPJMD provinsi dengan target kinerja 75%.
 - Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD Provinsi) dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKPD) dengan target kinerja 90%.
 - b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran Rp. 1.278.368.923,- dan realisasi sebesar Rp. 1.257.928.047,- atau 98,40%. Outcome dari program ini adalah :
 - Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dan RPJMD Provinsi dengan RKPD Provinsi dengan target kinerja 100%.
 - Persentase kesesuaian prioritas pembangunan pada RKPD kabupaten/kota dengan RKPD Provinsi dengan target kinerja 90%.
 - c. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan anggaran Rp. 5.552.773.808,- dan realisasi sebesar Rp. 5.383.941.015,- atau 96,96%. Outcome dari program ini adalah persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi dengan target kinerja 80%.

Berikut potret pencapaian target kinerja program dan kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Barat selama masa kerja Tahun 2020 :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan APBD Tahun 2020

No	Program	Outcome Program	Kegiatan	Input (Anggaran)			Indikator Output Kegiatan			
				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran, dengan		3.027.134.125	2.976.925.768,80	98,34				
			Penyediaan jasa surat menyurat	39.980.000	39.980.000	100,00	Tersedianya Benda Pos materai 6000 dan 3000, pengiriman surat dan Honor Pegawai PTT	12 Bulan	12 Bulan	100,00
			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik	919.000.000	893.081.646	97,18	Terlaksananya pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet	12 bulan	12 bulan	100,00
			Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	902.370.000	883.791.766,80	97,94	Tersedianya jasa petugas dan peralatan kebersihan kantor, tersedianya jasa sopir kantor, Tersedianya jasa petugas dan peralatan keamanan kantor	12 bulan	12 bulan	100,00
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	69.295.000	69.011.327	99,59	Terlaksananya jaminan asuransi kendaraan operasional kantor	13 unit	13 unit	100,00
			Penyediaan alat tulis kantor	48.681.583	48.669.796	99,98	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	100,00
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.951.284	35.891.034	99,83	Terlaksananya pencetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100,00

No	Program	Outcome Program	Kegiatan	Input (Anggaran)			Indikator Output Kegiatan			
				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
			Penyediaan komponen instalasi listrik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.930.545	5.924.145	99,89	Tersedianya alat-alat listrik untuk penerangan kantor	12 bulan,	12 bulan,	100,00
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	32.040.000	32.004.000	99,89	Tersedianya bahan bacaan, surat kabar, majalah dan buku-buku	6 jenis Koran, 2 majalah dan buku	6 jenis Koran, 2 majalah dan buku	100,00
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	820.140.753	815.498.694	99,43	Rapat koordinasi dalam dan luar daerah yang diikuti	12 bulan	12 bulan	100,00
			Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental	103.744.960	103.121.360	99,40	Terlaksananya wirid dan Terlaksananya kegiatan senam	12 bulan	12 bulan	100,00
			Penyediaan makanan dan minuman	50.000.000	49.952.000	99,90	rapat/pertemuan yang diselenggarakan	12 bulan	12 bulan	100,00
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur, dengan capaian 100%		636.951.314	634.512.689	99,62				
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	112.563.750	112.534.323	99,97	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100,00
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	180.000.000	179.905.580	99,95	Pemeliharaan Gedung Kantor	12 bulan	12 bulan	100,00
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	83.102.364	81.474.886	98,04	Pemeliharaan kendaraan operasional	13 unit	13 unit	100,00

No	Program	Outcome Program	Kegiatan	Input (Anggaran)			Indikator Output Kegiatan			
				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	32.500.000	32.415.000	99,74	Telaksananya pemeliharaan AC, Tabung Pemadam kebakaran dan mesin pompa air beserta suku cadang	12 bulan	12 bulan	100,00
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	19.885.200	19.769.000	99,42	Gedung Kantor yang diperbaiki	1 unit	1 unit	100,00
			Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	13.000.000	12.995.400	99,96	Perbaikan Sound System, Telepon, Faximile, CCTV dan jaringan, Kamera dan Projector	12 bulan	12 bulan	100,00
			Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	30.000.000	29.918.500	99,73	Terlaksananya pemeliharaan rutin komputer, laptop, printer, UPS, Scan dan Jaringan Komputer	12 bulan	12 bulan	100,00
			Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	165.900.000	165.500.000	99,76	Tersedianya komputer, laptop dan printer	10 unit	3 unit, 4 unit, 3 unit	100,00
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas, dengan capain 100%		67.500.000	67.498.200	100,00				
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	67.500.000	67.498.200	100,00	Meningkatnya kerapian dan disiplin pegawai dalam berpakaian dinas	90 Stel	90 Stel	100,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rata-rata lamanya PNS mengikuti diklat		1.220.000	1.125.000	92,21				
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1.220.000	1.125.000	92,21	ASN yang mengikuti Bimtek	2 orang	2 orang	100,00

No	Program	Outcome Program	Kegiatan	Input (Anggaran)			Indikator Output Kegiatan			
				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD, dengan capaian 100%		401.063.083	395.122.507	98,52				
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65.444.050	62.910.577	96,13	Tersusunnya dokumen pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD, Nilai Evaluasi SAKIP SKPD (LAKIP, LPPD dan LKPJ Bappeda)	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
			Penatausahaan keuangan SKPD	254.000.000	252.050.000	99,23	Jumlah PA; KPA; PPK; PPTK; dan pengelola keuangan	12 bulan	12 bulan	100,00
			Pengelolaan pengawasan dan pengendalian asset SKPD	42.960.000	42.960.000	100,00	Tersedianya kebutuhan pengelolaan barang milik daerah di SKPD	12 bulan	12 bulan	100,00
			Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	38.659.033	37.201.930	96,23	Tersusunnya Renja, DPA dan DPPA	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
6	Program Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan	- Persentase kelengkapan data pendukung untuk pengukuran kinerja sasaran pembangunan yang tercapai pada RPJMD provinsi, dengan capaian 100% - Persentase kualitas kesesuaian antara rencana (RKPD Provinsi) dengan hasil pelaksanaan pembangunan (SIPKD dan EKP)		210.624.628	205.560.003	97,60				
			Pengelolaan Website www.bappeda.sumbarprov.go.id	49.960.000	49.583.127	99,25	Update berita pada website Bappeda Sumbarprov.go.id	12 bulan	12 bulan	100,00
			Pengelolaan Data Dan Informasi Spasial Berbasis GIS Untuk Perencanaan Pembangunan	8.188.400	8.180.805	99,91	Terkelolanya data dan informasi spasial berbasis GIS untuk perencanaan pembangunan Sumatera Barat	1 laporan	1 laporan	100,00
			Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat	152.476.228	147.796.071	96,93	- Terlaksananya Forum Data Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat. - Terupdatenya Sistem Database Pembangunan Daerah (www.edatabasesumbarprov.go.id).	2 kali 1 aplikasi	2 kali 1 aplikasi	100,00

No	Program	Outcome Program	Kegiatan	Input (Anggaran)			Indikator Output Kegiatan			
				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
7	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD Provinsi dengan Renstra SKPD Provinsi, Renstra SKPD Provinsi dengan Renja SKPD Provinsi dengan RPJMD Provinsi dengan RKPD Provinsi, dengan capaian 100%. - Persentase kesesuaian prioritas pemb		1.278.368.923	1.257.928.047	98,40				
			Penyelenggaraan Musrenbang Penyusunan Dokumen Perencanaan	19.926.600	19.520.661	97,96	Tersedianya hasil Musrenbang RKPD Tahun 2020	1 dokumen, 10 buku laporan	1 dokumen, 10 buku laporan	100,00
			Penyusunan KUA/PPAS APBD	209.096.600	209.074.483	99,99	Tersusunnya KUA PPAS APBD Tahun 2021 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2020	2 Dokumen, 1385 buku	2 Dokumen, 1385 buku	100,00
			Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	571.325.274	559.080.501	97,86	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	7 modul	7 modul	100,00
			Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Swasta	17.629.749	16.381.532	92,92	Terlaksananya Penyusunan Buku Kerjasama Pemerintah dan Sasta (Public Private Partnership Book)	20 buku	20 buku	100,00
			Penyusunan RKPD	283.522.450	282.689.386	99,71	Buku RKPD Tahun 2021 dan RKPD Perubahan 2020	2 Dokumen, 380 eksemplar	2 Dokumen, 380 eksemplar	100,00
			Pengelolaan dan Penyebarluasan informasi dandokumentasi Perencanaan Pembangunan daerah	31.000.000	31.000.000	100,00	Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdistribusikan ke kabupaten/kota	2 dokumen	2 dokumen	100,00
			Pengembangan Kapasitas Aparatur Perencana	4.788.800	4.699.050	98,13	Jumlah Aparatur Fungsional perencana yang ditingkatkan kapasitasnya melalui Pertemuan, Sosialisasi, Workshop, Seminar dan even nasional	3 Orang	3 Orang	100,00
			Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	141.079.450	135.482.434	96,03	Tersedianya Rancangan Teknotratik RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	1 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100,00

No	Program	Outcome Program	Kegiatan	Input (Anggaran)			Indikator Output Kegiatan			
				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
8	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi, dengan capaian 100%		5.552.773.808	5.383.941.015	96,96				
			Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional	374.116.579	359.936.149	96,21	- Laporan kerjasama ekonomi regional dan internasional. - Mengikuti Rakorgub Se-Sumatera. - Mengikuti Rapat Teknis Rakorgub se Wilayah Sumatera. - Mengikuti kegiatan IMT-GT. - Mengikuti kegiatan kerjasama dengan luar negeri.	- 1 Dokumen (5 buku). - 1 kali - 1 kali - 2 negara - 8 Kementerian	- 1 Dokumen (5 buku). - 1 kali - 1 kali - 2 negara - 8 Kementerian	100,00
			Harmonisasi Progress Pelaksanaan Pencapaian Tujuan SDGs	18.315.126	16.916.337	92,36	Terlaksananya monitoring dan evaluasi percepatan pencapaian target SDGs di Sumatera Barat	1 laporan SDGs	1 laporan SDGs	100,00
			Harmonisasi Program/Kegiatan Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	42.975.917	27.543.863	64,09	Terlaksananya koordinasi perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Project (IPDMIP)	2.336.283.000	2.318.879.526	99,26	Perencanaan dan Implementasi program IPDMIP yang terkoordinasi	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Harmonisasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah Tertinggal	20.314.282	20.314.282	100,00	Tersedianya buku laporan pelaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	100,00

No	Program	Outcome Program	Kegiatan	Input (Anggaran)			Indikator Output Kegiatan			
				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
			Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	77.744.830	68.715.161	88,39	Jumlah buku hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2019	1 buku (65 eksemplar)	1 buku (65 eksemplar)	100,00
			Pemantauan dan Pelaporan Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sesuai PP No. 39 Tahun 2006	14.298.400	14.198.866	99,30	Jumlah laporan hasil pemantauan melalui aplikasi e-Monev Bappenas	4 triwulan	4 triwulan	100,00
			Harmonisasi Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Bidang Ekonomi	170.646.701	170.634.991	99,99	Perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang ekonomi yang harmonis dan sinkron	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
			Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	126.562.528	125.426.508	99,10	Jumlah rapat evaluasi dokumen perencanaan	8 Kali	8 Kali	100,00
			Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan	25.801.721	25.288.161	98,01	Dokumen Perencanaan Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan Perikanan yang sinkron	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha	14.629.450	14.580.938	99,67	Dokumen Perencanaan Akselerasi dan Sinkronisasi Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha yang sinkron	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Akselerasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	128.535.600	127.188.203	98,95	Terlaksananya Perencanaan pembangunan SDA, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	1 dokumen	1 dokumen	100,00

No	Program	Outcome Program	Kegiatan	Input (Anggaran)			Indikator Output Kegiatan			
				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
			Akselerasi dan Harmonisasi Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	15.350.956	15.346.995	99,97	Laporan RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebagai pedoman bagi OPD untuk penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1 laporan	1 laporan	100,00
			Akselerasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	142.712.450	141.770.945	99,34	Dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan di Provinsi Sumatera Barat yang sinkron	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
			Akselerasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sanitasi Pemukiman	41.183.200	36.507.790	88,65	Perencanaan pembangunan sanitasi permukiman Provinsi Sumatera Barat yang sinkron dengan pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
			Akselerasi dan Sinkronisasi Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air	13.334.400	13.004.555	97,53	Dukungan perkuatan kelembagaan sumber daya air (Komisi Irigasi, Dewan Sumber Air, TKPSDA, dll)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
			Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	512.508.200	503.263.238	98,20	- Rancangan RKPd lingkup bidang pembangunan sosial budaya dan pemerintahan. - KUA PPAS Lingkup Bidang Sosial dan Budaya. - Rancangan akhir Renja SKPD 2021. - Rancangan Renja Perubahan SKPD 2020.	4 dokumen dan 6 kali rapat koordinasi	4 dokumen dan 6 kali rapat koordinasi	100,00
			Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sosial Budaya	54.635.950	54.301.706	99,39	Sasaran pembangunan sub bidang sosial budaya yang tercapai	1 laporan	1 laporan	100,00

No	Program	Outcome Program	Kegiatan	Input (Anggaran)			Indikator Output Kegiatan			
				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
			Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur	54.090.368	53.418.413	98,76	Sasaran pembangunan sub bidang pemerintahan dan aparatur yang tercapai	1 laporan	1 laporan	100,00
			Akselerasi Pencapaian Sasaran Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Manusia	40.556.500	40.480.141	99,81	Sasaran pembangunan Sub Bidang Sumberdaya manusia yang tercapai	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Pelaksanaan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	45.772.000	45.513.750	99,44	Pelaksanaan rakor AMPL Kab/kota	2 kali	2 kali	100,00
			Harmonisasi Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan	51.013.926	48.603.264	95,27	Terlaksananya Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, Tersusunnya laporan koordinasi	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Harmonisasi Program/Kegiatan Pangan dan Gizi	43.631.451	41.311.985	94,68	terlaksananya pemantauan pelaksanaan program/kegiatan pangan dan gizi	4 kabupaten	4 kabupaten	100,00
			Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Provinsi dan Kabupaten/Kota	341.428.756	335.877.198	98,37	- Jumlah Renja yang dievaluasi. - Jumlah dokumen RKPD dan perubahan RKPD Kab/Kota yang difasilitasi. - Jumlah RPJMD Kab/Kota yang dievaluasi.	- 50 renja - 19 kab/kota - 2 kab/kota	- 50 renja - 19 kab/kota - 2 kab/kota	100,00

No	Program	Outcome Program	Kegiatan	Input (Anggaran)			Indikator Output Kegiatan			
				Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	Output Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
			Pelaksanaan Rakortek Pembangunan Daerah	76.206.805	76.146.433	99,92	Mengikuti pelaksanaan Rakortek Tingkat Pusat	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	1.944.261	1.944.261	100,00	Meningkatnya kapasitas TKPK Provinsi dan Kab/Kota	1 laporan	1 laporan	100,00
			Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	172.943.257	101.497.467	58,69	Revisi Perda RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	1 dokumen	1 dokumen	100,00
			Tata Kelola Pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah	363.048.900	354.036.201	97,52	Terkoordinasinya Perencanaan dan implementasi program PHJD	1 kali	1 kali	100,00

Sementara itu, melalui anggaran dekonsentrasi (APBN) yang diamanahkan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 385.727.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 380.599.780,- atau mencapai 98,67% yang mencakup 6 kegiatan dengan potret capaian per kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2020

Kode	Program/Kegiatan/Output/Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2020			
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa
01.06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	385.727.000	380.599.780	98,67	5.127.220
5246	Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang				
A.	Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Sasaran Program Pembangunan Nasional	66.618.000	64.263.300	96,47	2.354.700
1	Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah	51.938.000	50.383.300	97,01	1.554.700
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.500.000	1.450.000	96,67	50.000
521211	Belanja Bahan	23.276.000	23.225.000	99,78	51.000
521213	Honor Output Kegiatan	6.100.000	6.100.000	100,00	-
522151	Belanja Jasa Profesi	9.500.000	9.500.000	100,00	-
524111	Belanja Perjalanan Dinas	11.562.000	10.108.300	87,43	1.453.700
2	Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024	6.840.000	6.140.000	89,77	700.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-	-
521211	Belanja Bahan	2.440.000	2.440.000	100,00	-
521213	Honor Output Kegiatan	-	-	-	-
522151	Belanja Jasa Profesi	4.400.000	3.700.000	84,09	700.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
3	Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional	7.840.000	7.740.000	98,72	100.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-	-
521211	Belanja Bahan	2.440.000	2.440.000	100,00	-
521213	Honor Output Kegiatan	-	-	-	-
522151	Belanja Jasa Profesi	5.400.000	5.300.000	98,15	100.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	-
524114	Belanja Perjalanan dinas paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-
B	Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	206.260.000	204.378.980	99,09	1.881.020
1	Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah	198.420.000	196.638.980	99,10	1.781.020
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.000.000	3.999.980	100,00	20
521211	Belanja Bahan	42.170.000	41.639.000	98,74	531.000
521213	Honor Tim Pelaksana Kegiatan	3.150.000	1.900.000	60,32	1.250.000
522151	Belanja Jasa Profesi	29.050.000	29.050.000	100,00	-
524111	Belanja Perjalanan Biasa	120.050.000	120.050.000	100,00	-

Kode	Program/Kegiatan/Ouput/Sub Output/Komponen/Sub Komponen/Akun/Detail	Anggaran Dekonsentrasi Tahun 2020			
		Pagu	Realisasi	% Realisasi	Sisa
2	Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional	7.840.000	7.740.000	98,72	100.000
521211	Belanja Bahan	2.440.000	2.440.000	100,00	-
522151	Belanja Jasa Profesi	5.400.000	5.300.000	98,15	100.000
C	Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi	112.849.000	111.957.500	99,21	891.500
521115	Honor Operasional Satker	64.800.000	64.800.000	100,00	-
521211	Belanja Bahan	9.080.000	9.052.000	99,69	28.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	12.647.000	12.624.800	99,82	22.200
524111	Belanja Perjalanan Dinas	26.322.000	25.480.700	96,80	841.300
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dari 3 sasaran dengan 6 kegiatan bisa dilaksanakan seluruhnya sampai dengan kondisi Desember tahun 2020. Kegiatan tersebut yaitu :

1) Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah ini adalah meningkatkan pemahaman aparatur perencanaan dan keuangan daerah dalam melaksanakan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dalam menyusun dokumen perencanaan terutama Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dokumen keuangan daerah (KUA PPAS, RAPBD).

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Lantai III Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh 200 orang peserta yang terdiri dari aparatur perencana Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat serta OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota terpilih.

Narasumber pada Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah ini berasal :

- Direktorat Informasi Pembangunan Daerah, Ditjen Bina Bangsa, Kemendagri.
- Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Ditjen Bina Bangsa, Kemendagri.
- Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Ditjen Bina Keuda, Kemendagri.

Manfaat yang diperoleh peserta dari pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Asistensi Perencanaan dan Penganggaran Daerah ini adalah:

- Peserta Rakor memahami Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peserta Rakor memahami Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Peserta Rakor yang berasal dari OPD Provinsi dan Kab/Kota bersepakat akan melakukan pemetaan terhadap dokumen perencanaan sesuai dengan Permendagri No. 90 Tahun 2019.

- 2) Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan mendukung Prioritas Nasional.

Kegiatan Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional ini dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 secara virtual meeting dengan host dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini diikuti oleh 75 orang peserta dari Bappeda Kab/Kota se Sumatera Barat, Pejabat Struktural dan Fungsional Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Narasumber pada Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional ini berasal dari :

- a. Direktorat Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- b. Fungsional Perencana Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Hasil yang diharapkan melalui kegiatan Bimtek dan Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Kewilayahan Mendukung Prioritas Nasional ini adalah :

- a. Peserta Bimtek mengetahui bagaimana menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan holistic-tematik, integrative dan spasial sebagaimana yang diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- b. Lahirnya persamaan persepsi dalam proses merumuskan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan.

- 3) Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah

Kegiatan Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah pada tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 00442/D.9/01/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2020, terdiri atas beberapa tahapan, yaitu :

- a. Pembentukan Tim Penilai Independen, Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Teknis Tahun 2020
- b. Sosialisasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 bagi Kab/Kota
- c. Penilaian Tahap I PPD Tahun 2020
- d. Penilaian Tahap II PPD Tahun 2020 ke Kab/Kota Nominasi
- e. Penetapan Pemenang Kab/Kota PPD Tingkat Provinsi Tahun 2020

Manfaat yang didapat melalui kegiatan Koordinasi Penilaian dan Penghargaan terhadap Dokumen Perencanaan Daerah antara lain :

- a. Meningkatnya motivasi, komitmen dan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun dokumen perencanaan dengan baik, dan melaksanakan pembangunan di daerah dengan efektif dan efisien.
- b. Lahirnya inovasi-inovasi kreatif dan dinamis dari pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

- 4) Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020 secara virtual meeting yang diikuti oleh 125 orang peserta dari OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Kab/Kota se Sumatera Barat, Pejabat Struktural dan Fungsional Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Narasumber pada Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional ini berasal dari :

- a. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/BAPPNAS.
- b. BPS Sumatera Barat.
- c. Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat.
- d. Guru Besar Fakultas Ekonomi UNAND

Manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Regional dan Agenda Prioritas Nasional antara lain:

- a. Lahirnya persamaan persepsi dalam memahami sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
- b. Bertambahnya pemahaman aparatur perencanaan dilingkup Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas.

- 5) Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 November 2020 secara virtual meeting yang diikuti oleh 75 orang peserta dari Bappeda Kab/Kota se Sumatera Barat, Pejabat Struktural dan Fungsional Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Narasumber dan substansi materi pada Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024 ini adalah Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D (Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/BAPPNAS), judul materi Penyelarasan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Manfaat yang didapat melalui Asistensi dan Penyelarasan Sasaran dan Program RPJMD dengan RPJMN 2020-2024 antara lain :

- a. Bertambahnya pemahaman peserta dalam rangka merumuskan dan menyusun dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD Kab/Kota.
- b. Lahirnya kesamaan persepsi dalam memahami konsep perencanaan secara utuh yang berangkat dari akar permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan.

- 6) Fasilitas Kesekretariatan Dekonsentrasi Provinsi

Kegiatan ini bertujuan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Dekonsentrasi Satker Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dengan ruang lingkup kegiatan adalah :

- a. Penyusunan TOR kegiatan
- b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- c. Melaksanakan tertib administrasi kegiatan, keuangan dan pelaporan
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan, laporan BMN, laporan persediaan setiap bulan, triwulan, semester dan akhir tahun

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat berisikan 2 (dua) laporan kinerja, yaitu Laporan Capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat selaku instansi penunjang perencanaan dengan hasil capaian pada tahun 2020 sebagai berikut :

1. Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2020 dilihat dari capaian indikator makro yang diukur melalui 6 indikator yaitu 1) Indeks Pembangunan Manusia dengan capaian indeks sebesar 72,38; 2) Tingkat Kemiskinan dengan capaian 6,56%; 3) Angka Pengangguran dengan capaian 190,61 ribu orang; 4) Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian pertumbuhan yang berkontraksi pada level 1,60%; 5) PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dengan capaian sebesar Rp. 44,03 juta; 6) Ketimpangan Pendapatan yang diukur dengan Gini Rasio dengan capaian indeks 0.301.
2. Capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 dilihat dari serapan APBD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) adalah sebesar Rp. 10.922.613.229,80,- atau sebesar 97,74% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 11.175.635.881,- yang didukung melalui 8 Program yang terdiri atas 5 Program Non Urusan dan 3 Program Urusan Fungsi Penunjang Perencanaan dengan total kegiatan sebanyak 65 kegiatan. Sementara itu, melalui anggaran dekonsentrasi (APBN) yang diamanahkan kepada Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 385.727.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 380.599.780,- atau mencapai 98,67% yang mencakup 6 kegiatan.
3. Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat meliputi 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, dengan capaian indikator Sasaran Strategis 1 (Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan) adalah dengan predikat **amat baik** (100%), dan sasaran strategis 2 (Meningkatkan tata kelola organisasi) dengan predikat **amat baik** (100%). Dengan demikian pencapaian indikator sasaran strategis Bappeda pada tahun 2020 secara rata-rata adalah **amat baik** (100%).

4.2 Saran

Agar kegiatan dapat terlaksana sesuai target, ke depannya perlu perencanaan yang akurat namun fleksibel untuk mengantisipasi permasalahan pemangkasan anggaran, dan atau reposisi anggaran akibat kebijakan-kebijakan yang mungkin muncul. Disamping itu perlu dibuat ranking prioritas kegiatan sesuai kebutuhan organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana lebih optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda selaku instansi penunjang perencanaan.